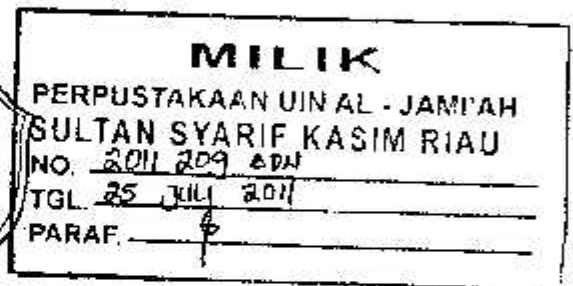


# **SKRIPSI**

## **ANALISIS PELAKSANAAN TUGAS BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH (BAPPEDA) DALAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN FISIK DI KABUPATEN BENGKALIS (STUDI KASUS DI KECAMATAN BENGKALIS)**

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mengikuti  
Ujian Oral Komprehensif Sarjana Lengkap  
Fakultas Ekonomi Dan Ilmu Sosial  
Universitas Islam Negeri  
Sultan Syarif Kasim  
Riau**



**OLEH :**



**SYAHFALEVI TAUFIQ PRASETYA**

**NIM. 10576002282**

**PROGRAM S1  
JURUSAN ADMINISTRASI NEGARA**

**FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SULTAN SYARIF KASIM  
RIAU  
2011**

## **ABSTRAK**

### **ANALISIS PELAKSANAAN TUGAS BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH (BAPPEDA) DALAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN FISIK DI KABUPATEN BENGKALIS (STUDI KASUS DI KECAMATAN BENGKALIS)**

**Oleh: Syahfalevi Taufiq Prasetya**

*Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, Bappeda dituntut untuk dinamis mengadakan penyesuaian dan selalu tanggap terhadap berbagai perubahan yang terjadi di masyarakat, serta berorientasi pada pembaharuan terutama dalam merumuskan berbagai kebijakan perencanaan pembangunan daerah. Berdasarkan uraian yang dikemukakan diatas, maka penulis merumuskan masalah pokok penelitian tentang "Bagaimana Pelaksanaan Tugas Bappeda Dalam Perencanaan Pembangunan Fisik di Kabupaten Bengkalis (Studi Kasus di Kecamatan Bengkalis)". Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis pelaksanaan tugas Bappeda Kabupaten Bengkalis dalam perencanaan pembangunan fisik di Kecamatan Bengkalis. Lokasi penelitian ini adalah Kantor Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau. Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Januari - Maret 2010. Pada penelitian ini, yang menjadi populasi adalah seluruh pegawai yang bekerja pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Bengkalis yaitu sebanyak 51 orang. Untuk sampel penulis menggunakan teknik sensus atau dengan kata lain seluruh populasi penulis jadikan sebagai responden. Dari uraian mengenai Pelaksanaan Tugas Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) dalam Perencanaan Pembangunan Fisik di Kecamatan Bengkalis diatas dapat disimpulkan bahwa : 1) Berdasarkan indikator tugas dalam perencanaan, tugas dalam pengumpulan data, tugas dalam pelaksanaan pembangunan, dan tugas dalam penilaian di dapatkan secara keseluruhan yang menyatakan baik sebanyak 45%, kemudian yang menyatakan cukup sebanyak 44% dan yang menyatakan kurang baik sebesar 11%. Artinya, Pelaksanaan Tugas Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) dalam Perencanaan Pembangunan Fisik di Kecamatan Bengkalis dikatakan baik dan berjalan dengan optimal. 2) Masih ditemuinya hambatan-hambatan untuk menunjang keberhasilan pelaksanaan tugas BAPPEDA Kabupaten Bengkalis diantaranya: a) Terbatasnya kewenangan BAPPEDA dalam rekrutment pegawai, sehingga terdapat ketidak sesuaian penempatan pejabat struktural dengan latar belakang pendidikan dengan jabatan yang dipimpin. b) Masih terbatasnya kesediaan data yang akurat yang merupakan bahan acuan dasar bagi proses perencanaan pembangunan daerah. c) Kurangnya kemampuan sumber daya manusia staf BAPPEDA dalam menjabarkan tugas pokok dan fungsinya terutama dalam bidang perencanaan.*

*Kata kunci : Pelaksanaan Tugas*

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji bagi Allah Rabbul 'Alamin dalam setiap keadaan. Penulis bersyukur kepadaNya atas segala petunjuk, pertolongan dan karunia serta rahmatNya yang terlimpah sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan karya ilmiah berupa skripsi dengan judul ***"Analisis Pelaksanaan Tugas Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) dalam Perencanaan Pembangunan Fisik di Kabupaten Bengkalis (Studi Kasus di Kecamatan Bengkalis)"***.

Shalawat dan salam semoga terlimpahkan atas sebaik-baik hamba yang bersabar dan bersyukur, Muhammad Shallallahu 'alaihi wa sallam dan atas keluarga serta para shahabat beliau dan orang-orang yang mengikuti beliau dengan baik sampai hari akhir kelak.

Merupakan suatu ketnangan dan kebahagiaan bagi penulis ketika mampu mencurahkan segenap tenaga, kemampuan dan dana untuk penyelesaian skripsi ini. Besar harapan penulis semoga hasil karya tulis ini bermanfaat terutama bagi diri penulis maupu dunia pendidikan.

Penulis sepenuhnya menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, baik dari segi pembahasan maupun dari tata bahasanya. Hal ini karena keterbatasan ilmu dan pengetahuan yang peneliti miliki, maka dengan tangan terbuka dan hati yang lapang peneliti menerima kritik dan saran dari berbagai pihak demi kesempurnaan dimasa yang akan datang.

Dalam penulisan skripsi ini juga tidak luput dari bantuan serta dukungan dari berbagai pihak. Untuk itu pada kesempatan ini peneliti mengucapkan ribuan terima kasih kepada yang terhormat :

1. Orang Tua yang paling saya cintai, H. M. Syarif Nong (alm.), Hj. Zaidar Ibrahim dan Hj. Hafsa Tutih, yang telah memberikan kekuatan kepadaku hingga aku mampu hidup dan tumbuh besar seperti sekarang.
2. Bapak Drs. Azwar Harahap, M.Si, selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
3. Bapak Drs. Almasri, M.Si selaku Ketua Jurusan Administrasi Negara Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
4. Bapak Afrizal, S.Sos, M.Si selaku dosen pembimbing I dan Bapak Rusdi, S.Sos., MA selaku pembimbing II yang sudah banyak memberikan segala sesuatu yang berhubungan dengan penyelesaian skripsi ini, baik dari segi waktu, tenaga maupun pikiran.
5. Bapak/ Ibu dosen dan pengajar serta staf tata usaha pada lingkungan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
6. Seluruh pegawai, Kepala maupun staf BAPPEDA Kabupaten Bengkalis yang telah banyak membantu saya dalam penyelesaian skripsi ini.
7. Seluruh pegawai, Kepala maupun staf BAPPEDA Kabupaten Siak yang sudi menerima saya dan membimbing saya selama melaksanakan Praktek Kerja Lapangan (PKL).
8. Keluarga yang saya cintai dan mencintai saya, Ayahanda Azwir dan Keluarga, Ayahanda Bayu dan Keluarga, Ayahanda Sandra & Keluarga, Ayahanda

Amrisal dan Keluarga, Ayahanda Amalin dan keluarga serta Ayahanda Kahar dan keluarga.

9. Keluarga Kharisma-xx, Eureka dan Euginia, Qunul-Net, Fun-Net dan Indie-Net yang membesarkan saya di perantauan (Paklong Surya, Atah Mudja, Bg Galib PM, Tok Rafdy, Bg LoNkang, Bg Bogel, Bg Raffi, Dheny Andriyal & Keluarga, para tetua dan pemangku adat Kharisma-xx serta seluruh anggota yang masih setia hidup di kos kita tercinta "jangan biarkan [dia] mati suri").
10. Teman-teman seperjuangan di UIN SUSKA angkatan 2005, spesial untuk seluruh awak ANA/B.
11. Teman-teman seperjuangan angkatan 2005 Sekolah Menengah Atas (SMANSA) Bengkalis.
12. Untuk mereka yang mengenal, mencintai, menyayangi serta memusuhi saya dengan segenap jiwa. Terima kasih untuk do'a, dukungan dan caci maki kalian, itu semua yang menjadikan ku lebih dewasa.

Terakhir sebagai hamba yang memiliki keterbatasan, penulis menyadari dalam penulisan skripsi ini terdapat kekurangan atau kesalahan. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan kritik dan saran pembaca yang bersifat membangun guna kesempurnaan skripsi ini.

Pekanbaru, April 2011  
Penulis,

SYAHFALEVI TAUFIQ PRASETYA

## DAFTAR ISI

	Halaman
<b>ABSTRAK</b> .....	i
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	ii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	v
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	vii
<b>DAFTAR GRAFIK</b> .....	vii
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	xi
 <b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	 1
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Perumusan Masalah.....	16
1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	17
1.4 Sistematika Penulisan .....	18
 <b>BAB II TELAAH PUSTAKA</b> .....	 19
2.1 Kerangka Teori.....	19
2.2 Definisi Konsep.....	32
2.3 Definisi Operasional.....	34
2.4 Teknik Pengukuran .....	35
 <b>BAB III METODE PENELITIAN</b> .....	 38
3.1 Jenis Penelitian .....	38
3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian.....	38
3.3 Populasi dan Sampel .....	38
3.4 Sumber Data .....	40
3.5 Teknik Pengumpulan Data .....	41
3.6 Hipotesis .....	41
3.7 Teknik Analisis Data.....	42
 <b>BAB IV GAMBARAN UMUM</b> .....	 43

4.1 Gambaran Umum Kabupaten Bengkalis .....	43
4.2 Keadaan Umum/ Sejarah Bappedda Kabupaten Bengkalis .....	48
4.3 Keadaan Pegawai Bappedda Kabupaten Bengkalis .....	51
4.4 Sarana dan Prasarana Bappedda Kabupaten Bengkalis .....	56
4.5 Visi, Misi, Tujuan, Strategis dan Kebijakan .....	58
<b>BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>64</b>
5.1 Identitas Responden .....	64
5.2 Analisis Pelaksanaan Tugas Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Bengkalis dalam Perencanaan Pembangunan Fisik di Kecamatan Bengkalis .....	67
<b>BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN .....</b>	<b>86</b>
6.1 Kesimpulan .....	86
6.2 Saran.....	87

## **DAFTAR PUSTAKA**

## **LAMPIRAN**

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Pembangunan yang telah dilaksanakan di Indonesia sebagai negara kesatuan dari tiga priode yang di mulai dari Orde Lama, Orde Baru dan sampai sekarang ini berada pada era pembaharuan yang sering diagungkan sebagai era reformasi. Pembangunan nasional adalah pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan seluruh masyarakat Indonesia.

Ditinjau dari sistem kenegaraan dan pemerintah berarti sasaran utama pembangunan nasional adalah wilayah kecamatan, yang meliputi wilayah kelurahan ataupun pedesaan dengan segala sumber daya, terutama sumber daya manusia. Kemampuan Camat sebagai kepala wilayah hendaknya harus mampu memberdayakan semua aparatnya baik itu para stafnya hingga sampai ke kepala desa/ lurah untuk menggerakkan rakyat dalam melaksanakan pembangunan di kecamatannya.

Dalam usaha pencapaian tujuan pembangunan kecamatan sangatlah berbeda satu kecamatan dengan kecamatan lainnya. Hal ini disebabkan perbedaan akan arah serta tujuan dari pimpinan tersebut. Pada dasarnya hakikat pembangunan nasional merupakan rangkaian kegiatan upaya pembangunan yang berkesinambungan yang meliputi seluruh kehidupan masyarakat, bangsa dan negara untuk melaksanakan tugas mewujudkan tujuan nasional yang termaktub dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa,



serta ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Pada saat sekarang pelaksanaan pembangunan di kecamatan sebagian besar dilaksanakan oleh pemerintah daerah melalui APBD (Anggaran Pendapatan Belanja Daerah) yaitu dengan cara kepala desa yang berada di wilayah Kecamatan Bengkalis melaksanakan Musyawarah Pembangunan Desa (Musbangdes), yang didalamnya memuat apa-apa saja yang akan dibangun baik pembangunan fisik maupun non fisik di desa-desa tersebut. Pembangunan fisik (Arifin, 2004 : 123) adalah suatu usaha yang terencana dan sadar yang dilakukan suatu organisasi untuk mewujudkan pertumbuhan dan perubahan yang secara nyata dapat dilihat dan dirasakan manfaatnya oleh seseorang seperti jalan, jembatan, sekolah, rumah ibadah, drainase, turap, gedung pemerintah, gedung lembaga, rumah PNS dan lain-lain yang dapat dilihat.

Sedangkan pembangunan non fisik adalah suatu usaha yang terencana dan sadar yang dilakukan suatu organisasi untuk mewujudkan pertumbuhan dan perubahan yang secara nyata tidak dapat dilihat dan dapat dirasakan manfaatnya oleh seseorang seperti: pelatihan-pelatihan, workshop, dan studi-studi. Dari hasil Musbangdes tersebut dilaporkan kepada Camat sebagai Kepala Wilayah. Oleh Camat dari hasil Musbangdes tersebut ditindak lanjuti dengan cara melaksanakan Musyawarah Rencana Pembangunan di tingkat Kecamatan (Musrenbang Kecamatan), yang didalamnya juga kemudian memuat apa-apa saja yang akan dibangun dikecamatan tersebut baik pembangunan fisik maupun non fisik. Hasil dari musyawarah tersebut, dilaporkan Camat kepada kepala daerah melalui Badan

Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Bengkalis yang nantinya melaksanakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (Musrenbangda).

Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (Musrenbangda) Kabupaten Bengkalis merupakan musyawarah stakeholder Kabupaten untuk mematangkan rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Bengkalis berdasarkan Renja-SKPD (Rencana Kerja - Satuan Kerja Perangkat Daerah) hasil forum SKPD dengan cara meninjau keserasian antara rancangan Renja-SKPD yang hasilnya digunakan untuk pemutakhiran Rancangan RKPD.

Dalam melaksanakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (Musrenbangda) Kabupaten Bengkalis ini memiliki dasar hukum dan tujuan yaitu:

a. Dasar Hukum

1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
4. Surat Edaran Bersama Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas dan Menteri Dalam Negeri Nomor: 1181/M.PPN/02/2006 dan 050/244/SJ tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Musrenbang Tahun 2006;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 4 Tahun 2005 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bengkalis.

## b. Tujuan

1. Menampung dan menetapkan kegiatan prioritas sesuai kebutuhan masyarakat yang diperoleh dari musyawarah perencanaan pada tingkat di bawahnya (Musyawarah Dusun/kelompok).
2. Menetapkan kegiatan prioritas desa/kelurahan yang akan dibiayai melalui Alokasi Dana Desa/Kelurahan yang berasal dari APBD Kabupaten/Kota maupun sumber pendanaan lainnya.
3. Menetapkan kegiatan prioritas yang akan diajukan untuk dibahas pada Forum Musrenbang Kecamatan (untuk dibiayai melalui APBD Kabupaten/Kota atau APBD Provinsi).

Perencanaan yang baik sangat diperlukan untuk pemenuhan kebutuhan yang baik, dengan mengupayakan faktor yang ada di Kecamatan secara maksimal. Pemerintah melalui program pembangunan menempatkan beberapa proyek dikecamatan antara lain : pembangunan jalan, jembatan, sekolah, rumah ibadah, drainase, turap, gedung pemerintah, gedung lembaga, rumah PNS dan lain-lain.

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) adalah badan yang dibentuk oleh kepala daerah yang tugasnya membantu kepala daerah dalam menyelenggarakan sebagian tugas umum pemerintah dan pembangunan di bidang perencanaan pembangunan daerah.

Sedangkan arti penting pelaksanaan tugas menurut Mochd. As'ad (2000; 65) yaitu pelaksanaan tugas adalah hasil kerja yang dapat dicapai oleh seorang menurut ukuran yang berlaku untuk pekerjaan yang bersangkutan. Untuk mengukur atau menilai pelaksanaan tugas tersebut dapat dibagi yaitu: kualitas

pekerjaan, kuantitas pekerjaan, waktu pekerjaan, jabatan yang dipegang, absensi kerja serta keselamatan dalam menjalankan pekerjaan.

Dari pengertian diatas jelaslah bahwa Bappeda merupakan badan dibawah pemerintah daerah yang membantu dalam hal merencanakan pembangunan yang meliputi perencanaan pembangunan fisik maupun non fisik. Bappeda merupakan wahana partisipasi daerah dalam pembangunan daerah dari berbagai kegiatan pemerintah dan prakarsa serta masyarakat sebagai aspek kehidupan dalam rangka mewujudkan ketahanan nasional.

Pembaruan maupun perubahan-perubahan pada suatu rencana memasukkan data yang baru didapat kemudian, dengan memasukkan pada rencana yang berikutnya. Ada beberapa hal untuk menyempurnakan yaitu penyempurnaan administrasi kecamatan dan pembangunan dibidang lain yang dianggap mendukung perencanaan serta pelaksanaan pembangunan berikutnya, oleh karena penyempurnaan adalah bagian integral dari pelaksanaan pembangunan secara menyeluruh, yang dimaksud untuk menyusun mekanisme yang diperlukan bagi pelaksanaan yang tepat waktu dan tepat guna. Ada dua aspek mendasar perencanaan sebagai proses yang harus terus menerus yaitu :

- a. Penyusunan rencana,
- b. Pelaksanaannya.

Agar pembangunan dapat berjalan dengan kontinyu dan berkesinambungan, hendaklah rencana pembangunan tahun berjalan dikaitkan dengan anggaran berikutnya dan faktor umpan balik dari masyarakat harus selalu ditampung dan perlu mendapat perhatian yang mendasar, karena faktor-faktor ini

merupakan hal yang sangat dominan dalam pembuatan perencanaan. Menyusul dibentuknya Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antar Pemerintah Pusat dan Daerah, saat ini Pemerintah Kabupaten Bengkalis sedang mempersiapkan langkah-langkah dalam rangka otonomi daerah. Otonomi daerah memberikan peluang berupa kewenangan yang luas bagi daerah untuk mengelola dan mengatur program dan kegiatan pembangunan di daerah.

Salah satu faktor penentu keberhasilan pembangunan adalah perencanaan pembangunan yang baik dan dapat dirumuskan dalam program dan kegiatan pembangunan secara efektif dan efisien serta disesuaikan dengan anggaran dan belanja, atau kata lain disesuaikan dengan kemampuan daerah tersebut sehingga mampu mencapai hasil yang optimal dalam memanfaatkan sumber daya dan potensi yang dimiliki daerah. Fungsi perencanaan pembangunan ini pada pemerintah Kabupaten/kota dipegang oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda).

Dalam hal ini dapat dilihat dari Perkembangan Anggaran dan Realisasi Belanja, data terlampir.

**Tabel 1.1**  
**Perkembangan Anggaran dan Realisasi Anggaran Pembangunan Fisik**  
**Di Kecamatan Bengkalis 2005-2010 (Rp)**

No.	Tahun	Uraian		
		RENCANA ANGGARAN PEMBANGUNAN	REALISASI ANGGARAN	PENCAPAIAN TARGET (PERSENTASE)
1.	2005	11.732.657.688	9.573.887.596	62,35
2.	2006	12.551.789.712	11.985.232.907	56,34
3.	2007	15.254.446.638	13.779.381.402	80,54
4.	2008	14.152.174.988	12.366.539.992	90,33
5.	2009	16.899.146.076	14.960.079.820	84,97
6.	2010	13.843.299.582	11.600.610.013	81,09
<b>Jumlah</b>		<b>94.633.514.684</b>	<b>74.460.731.822</b>	<b>79,94</b>

Sumber : Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Akhir Masa Jabatan  
 Bupati Bengkalis, 2005-2010

Keterangan:

- a. Anggaran Pembangunan Yaitu terdiri dari: Jalan, Gedung Sekolah, Jembatan, Pelabuhan, Gedung RSUD (2004-2005), Gedung Olah Raga, Turap, Drainase, Biaya Tak Terduga, Rumah Dinas Pejabat (2006-2009)
- b. Realisasi Anggaran Yaitu terdiri dari: Jalan, Gedung Sekolah, Jembatan, Pelabuhan, Gedung RSUD (2004-2005), Gedung Olah Raga, Turap, Drainase, Biaya Tak Terduga, Rumah Dinas Pejabat (2006-2009)
- c. Pencapaian Target yaitu : Anggaran Pembangunan di bagi ( : ) Realisasi Anggaran

Pada Tabel diatas dapat dilihat perkembangan Anggaran dan Realisasi Anggaran Pembangunan Fisik di Kecamatan Bengkalis dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terakhir yaitu dari tahun 2004 – 2009. Rendahnya pencapaian

realisasi/penyerapan anggaran pembangunan di atas dikarenakan beberapa faktor penyebab utama antara lain:

1. Adanya beberapa program dan kegiatan yang belum atau tidak terlaksana sesuai dengan yang telah direncanakan.
2. Penetapan dan pengesahan APBD yang relatif terlambat jika dibandingkan dengan ketentuan sehingga terlalu sempitnya waktu yang tersedia untuk dapat menyelesaikan target yang telah ditetapkan.
3. Dalam penetapan anggaran belum dapat sepenuhnya mengestimasi/memperkirakan nilai yang relatif akurat sehingga terdapat kecenderungan jumlah yang dianggarkan ternyata lebih besar dari yang dapat direalisasikan.

Pada realisasi anggaran pembangunan diatas penulis tidak mencantumkan realisasi anggaran pembangunan tahun 2010 itu karena, perhitungan realisasi anggaran pembangunan pada tahun 2010 belum selesai dilakukan dan sedang dalam tahap perhitungan.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 4 Tahun 2005 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bengkalis, Bappeda Kabupaten Bengkalis mempunyai tugas dan fungsi:

a. Tugas Pokok Bappeda

Membantu Kepala Daerah dalam menyelenggarakan sebagian tugas umum pemerintah dan pembangunan dibidang perencanaan pembangunan Daerah.

Dalam mewujudkan hal tersebut diatas, Bappeda selaku pihak perencana memerlukan dukungan dan partisipasi dari pihak-pihak yang terkait yaitu: Camat,

Lurah/ Kepala Desa serta masyarakat agar, terus aktif dalam pembangunan dan dapat meningkatkan kemampuannya serta terus berkembang menuju sasaran pembangunan. Pembangunan fisik adalah suatu usaha yang terencana dan sadar yang dilakukan suatu organisasi untuk mewujudkan pertumbuhan dan perubahan yang secara nyata dapat dilihat dan dirasakan manfaatnya oleh seseorang seperti jalan, jembatan, sekolah, rumah ibadah, drainase, turap dan lain-lain.

Untuk mengetahui target dan realisasi pembangunan fisik yang berada di Kecamatan Bengkalis, dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

**Tabel: 1.2**  
**Target dan Realisasi Pembangunan Fisik di Kecamatan Bengkalis**  
**T.A 2005 - 2010**

No.	Kegiatan	Satuan	Target	Realisasi	%	Lama Pengerjaan		
						Target (Tahun)	Mulai	Selesai
1.	Gedung Olah Raga Perhasi Alam	%	100	89	89	1	27-Sep-04	15-Feb-06
2	RSUD Grand Hospital Bengkalis	%	100	80	80	1	05-Jul-03	12-Okt-05
3	Masjid	Unit	5	4	62,25	1	8 Oktober 2006	06-Jul-08
4	Pelabuhan Bandar Sri Laksamana	%	100	80	80	2	23-Jul-02	18-Mar-05
5	Turap	Meter	120	0	0	1	12-Sep-05	28-Dec-05
6	Jalan	Km	10,3	8,4	99,87	1	07-Jul-07	09-Dec-07
7.	Pembangunan lokal baru (SD, SMP, SMU)	lokal	118	118	100	1	18-Jul-06	1 November 2007

Sumber : LAKIP Kabupaten Bengkalis Tahun 2009

Dari tabel diatas dapat dilihat pembangunan fisik yang ada di Kecamatan Bengkalis belum lah berjalan dengan baik, hal ini dapat dilihat dari target dan realisasi dari pembangunan tersebut sehingga perlu ditinjau kembali



pelaksanaannya. Kita lihat dalam pembangunan Gedung Olah Raga Perkasa Alam yang mana ditargetkan bisa rampung 100% dalam waktu 1 Tahun, namun hanya teralisasi 89% dari jangka waktu yang telah di tetapkan dan sangat disayangkan kegiatan tersebut baru benar-benar rampung kurang lebih dalam 2 Tahun. Tentu saja hal seperti ini sangat merugikan waktu dan juga dari sisi finansial, karena anggaran untuk 1 kegiatan dalam 1 Tahun anggaran harus ditambah menjadi 2 Tahun anggaran.

Hal yang sama juga terjadi pada kegiatan pembangunan RSUD Grand Hospital Bengkalis dan program kegiatan yang ada lainnya. Yang paling memprihatinkan adalah kegiatan pembangunan turap di bibir pantai taman Kota Cik Mas Ayu, yang mana kegiatan tersebut tidak berjalan sama sekali.

Selanjutnya dapat dilihat bahwa proses pelaksanaan pembangunan yang terdapat di Kecamatan Bengkalis kurang berjalan secara optimal dan masyarakat juga dilihat kurang berpartisipasi dalam pembangunan tersebut. Sehingga dalam pencapaian keberhasilan pembangunan pada umumnya dan pada pembangunan fisik khususnya, sering tidak teralisasi dengan baik.

Perlu diketahui, mengapa penulis hanya mengambil data yang ada tersebut diatas sedangkan diketahui pada tahun tersebut banyak sekali pembangunan fisik yang dilakukan di Kecamatan Bengkalis itu, karena data pembangunan tersebut lebih dirasakan manfaatnya oleh masyarakat dan memang sangat dibutuhkan. Untuk penggunaan data penulis menggunakan data tahun 2009, mengapa penulis menggunakan data pada tahun tersebut karena data tersebut sudah disahkan oleh kepala daerah dan layak dipublikasikan, sedangkan data tahun 2010 dalam

6. Pelaksanaan perumusan dan persiapan perencanaan pembangunan secara teknis terhadap perkembangan pembangunan, teknologi dan kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten untuk penyempurnaan rencana pembangunan lebih intensif;
7. Pemantauan terhadap pelaksanaan pembangunan;
8. Melaksanakan monitoring serta pengevaluasian terhadap pelaksanaan pembangunan yang telah dilaksanakan;

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, Bappeda dituntut untuk dinamis mengadakan penyesuaian dan selalu tanggap terhadap berbagai perubahan yang terjadi di masyarakat, serta berorientasi pada pembaharuan terutama dalam merumuskan berbagai kebijakan perencanaan pembangunan daerah.

Mengingat besarnya tugas yang dimiliki oleh Bappeda maka dibutuhkan kemampuan dan keterampilan yang besar pula sehingga, tugas yang diemban dapat berjalan dengan baik. Karena dengan memiliki keterampilan yang sangat baik aparatur-aparatur Bappeda akan lebih mudah menjalankan tugasnya. Oleh sebab itu, perlu kesiapan SDM yang berkualitas sehingga, seluruh tugas yang menjadi tanggung jawab dan wewenang yang dimilikinya dapat diselesaikan dengan baik.

Selain itu juga, dengan kapasitas SDM yang dimiliki harus juga didukung dengan analisa jabatan yang dipimpin. Dengan kesesuaian antara pendidikan yang dimiliki dengan jabatan yang diemban maka berpengaruh terhadap tugas yang menjadi tanggung jawab.

Dalam hal itu tugas Bappeda dalam pembangunan di Kabupaten Bengkalis khususnya untuk pembangunan di Kecamatan Bengkalis pada kenyataan masih ditemukan beberapa gejala yang mengakibatkan terganggunya pembangunan diantaranya :

1. Masih ditemui pejabat struktural tidak sesuai dengan latar belakang pendidikan dengan jabatan yang dipimpin.
2. Masih terbatasnya kesediaan data yang akurat yang merupakan bahan acuan dasar bagi proses perencanaan pembangunan daerah. Yang mana nantinya data tersebut dijadikan sebagai faktor pendukung dalam membuat rencana pembangunan yang akan datang.

Latar belakang pendidikan sangat mempengaruhi kinerja pegawai dalam menjalankan tugasnya. Dampak yang ditimbulkan akibat penempatan tugas (jabatan) yang tidak sesuai dengan latar belakang pendidikan sangatlah besar. Selain merugikan dari sisi waktu, juga bisa merugikan dari sisi finansial. Waktu terbuang hanya untuk mendalami tugas yang diemban dan materi dikeluarkan hanya untuk melakukan pelatihan-pelatihan yang bersifat pengenalan atas tugas yang diemban. Berikut data pejabat struktural yang ada di Bappeda Kabupaten Bengkalis :

**Tabel 1.3**  
**Data Pejabat Struktural di Bappeda Kabupaten Bengkalis**

No.	Nama	Pangkat/ Golongan	Jabatan
1.	H. Azwar, SE. MM	Pembina Utama Muda (IV/c)	Kepala
2.	Drs. H. Amir Faisal, M.Si	Pembina TK.I (IV/b)	Sekretaris
3.	Dasril, S.Sos, M.AP	Pembina TK.I (IV/b)	Kasubag. Data dan Laporan
4.	Amawati, S.Sos, M.M	Pembina (IV/a)	Kasubag. Keuangan
5.	Syamsidar, SH	Pembina (IV/a)	Kasubag. Administrasi Umum
6.	Ryo Gunawan, ST	Penata TK.I (III/d)	Kabid. Fisik
7.	Ir. Sufyan Ali	Penata TK.I (III/d)	Kabid. Perekonomian
8.	Paspa Granita, SE	Penata TK.I (III/d)	Kabid. Sosial dan Budaya
9.	Rahma Nurlita, S.H	Penata TK.I (III/d)	Kabid. Pemerintahan dan Aparatur
10.	Adiansyah, S, SH	Penata TK.I (III/d)	Kasubbid. Prasarana Fisik
11.	Zainab, SH	Penata (III/c)	Kasubbid. Tata Ruang
12.	Eko Endarnawan, SE	Penata (III/c)	Kasubbid. Usaha Perekonomian
13.	Sahairi, S.Sos	Penata (III/c)	Kasubbid. Pertanian
14.	Drs. Irawan Indrajaya	Penata Muda TK.I (III/b)	Kasubbid. Sosial Kemasyarakatan
15.	Yusrianto, SE	Penata Muda TK.I (III/b)	Kasubbid. Budaya
16.	Haziatun, S.Sos	Penata Muda TK.I (III/b)	Kasubbid. Aparatur dan SDM
17.	Drs. Rahim Gunawan	Penata Muda TK.I (III/b)	Kasubbid. Pemerintahan

Sumber Data : Bappeda Kabupaten Bengkalis 2009

Dari data diatas, bisa kita lihat bahwa penempatan jabatan yang tidak sesuai dengan latar pendidikan mereka. Seperti yang tertera pada No. 5 tabel diatas, Syamsidar, SH yang seorang sarjana Hukum memegang jabatan Kepala Sub Bagian Administrasi Umum. Kemudian ada Ir. Sufyan Ali yang merupakan sarjana Perikanan memegang jabatan sebagai Kepala Bidang Perekonomian. Dan

sebaliknya, seorang sarjana Ekonomi, yaitu Paspas Granita, SE duduk sebagai Kepala Bidang Sosial dan Budaya. Sungguh memprihatinkan memang. Gejala seperti ini setidaknya mempengaruhi proses pembangunan yang berlangsung di Kabupaten Bengkalis umumnya dan Kecamatan Bengkalis khususnya.

Sementara itu, data sangat dibutuhkan dalam proses pembangunan. Di setiap kegiatan pada umumnya memerlukan data yang lalu untuk merencanakan kegiatan berikutnya. Data yang dimaksudkan bisa berupa laporan akhir kegiatan dari setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang bertanggung jawab atas kegiatan tersebut. Atau untuk melakukan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (MUSRENBANG) di tingkat kecamatan, memerlukan data yang akurat dari tingkat desa/ kelurahan. Dalam kondisi dokumen penunjang tidak lengkap atau keterbatasan nara sumber, Musrenbang kecamatan tetap dilaksanakan namun dalam keadaan minim, sehingga Camat dapat menyusun gabungan prioritas kegiatan tahunan dari desa/kelurahan menurut SKPD. Hasilnya kemudian disampaikan kepada Forum SKPD dan Forum Gabungan SKPD di tingkat Kabupaten/Kota. Semua kondisi ini dicatat oleh notulen dalam Berita Acara Musrenbang Kecamatan. (sumber: *Surat Edaran Bersama "SEB" Musrenbang Kabupaten Bengkalis 2009*)

Untuk memenuhi kebutuhan sebelum melaksanakan pembangunan harus dibuat suatu rencana yang baik dan disertai dengan adanya tahapan pelaksanaan juga diikuti dengan pengawasan yang baik pula. Yang dimaksud dengan pengawasan disini adalah mengefektifkan fungsi monitoring dan evaluasi, dengan

monitoring dan evaluasi yang dilaksanakan dijadikan sebagai bahan acuan dan pertimbangan bagi perencanaan pembangunan.

Akan tetapi, fungsi pengawasan (monitoring dan evaluasi) ini belum efektif sehingga terjadi rendahnya daya serap anggaran belanja terutama disebabkan keterlambatan pengesahan anggaran rata-rata 6 (enam) bulan setiap tahunnya, sehingga kegiatan yang sebenarnya telah dapat dilaksanakan pada bulan Januari tertunda menjadi Juli.

Dari uraian diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul penelitian *"Analisis Pelaksanaan Tugas Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) dalam Perencanaan Pembangunan Fisik di Kabupaten Bengkalis (Studi Kasus di Kecamatan Bengkalis)"*.

## 1.2 Rumusan Masalah

Masih terbatasnya kesediaan data yang akurat yang merupakan bahan acuan bagi proses perencanaan pembangunan adalah salah satu kendala bagi aparatur-aparatur Bappeda dalam menjalankan tugasnya. Karena, dengan tersedianya data yang akurat maka pembangunan di Kabupaten Bengkalis dapat berjalan dengan baik. Sebagai contoh dalam penyusunan SHB (Standar Harga Barang) untuk kegiatan pembangunan 2007 harus disesuaikan dengan harga tahun 2007 dan lokasinya di Kabupaten Bengkalis, dan data ini di perbaharui tiap tahunnya sesuai dengan kapan pembangunan itu di laksanakan.

Selain itu juga belum efektifnya fungsi monitoring dan evaluasi yang hasilnya nanti untuk dimanfaatkan sebagai bahan penyusunan rencana

pembangunan tahun berikutnya. Secara umum monitoring ini ditiitik beratkan kepada sarana dan manfaat proyek baik fisik maupun keuangan yang dilaksanakan pada tahun berjalan. Pembangunan selalu berpedoman pada perencanaan yang baik karena dengan pembangunan yang baik maka itu merupakan keberhasilan dari perencanaan yang matang.

Berdasarkan uraian yang dikemukakan diatas, maka penulis merumuskan masalah pokok penelitian tentang **“Bagaimana Pelaksanaan Tugas Bappeda Dalam Perencanaan Pembangunan Fisik di Kabupaten Bengkalis (Studi Kasus di Kecamatan Bengkalis)”**.

### **1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian**

#### **1. Tujuan Penelitian :**

Untuk mengetahui dan menganalisis pelaksanaan tugas Bappeda Kabupaten Bengkalis dalam perencanaan pembangunan fisik di Kecamatan Bengkalis.

#### **2. Manfaat penelitian :**

- a. Sebagai bahan informasi bagi pimpinan Bappeda beserta jajarannya dalam perencanaan pembangunan di Kecamatan Bengkalis.
- b. Sebagai bahan informasi bagi penelitian berikutnya yang ingin melakukan penelitian pada permasalahan yang sama.

#### **1.4 Sistematika Penulisan**

##### **BAB I : PENDAHULUAN**

Pada bab ini sebagai pendahuluan dimana menguraikan latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian dan diakhiri dengan sistematika penulisan.

##### **BAB II : TELAAH PUSTAKA**

Pada bab ini penulis akan membahas tentang teori yang dilandasi pembahasan skripsi yang berhubungan dengan judul penelitian, definisi konsep dan definisi operasional, teknik pengukuran.

##### **BAB III : METODE PENELITIAN**

Pada bab ini penulis akan mengemukakan tentang bentuk penelitian, lokasi penelitian, populasi dan sampel, metode pengumpulan data, hipotesis dan teknik analisa analisa data.

##### **BAB IV : GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN**

Pada bab ini penulis menjelaskan kondisi geografis Bappeda, gambaran umum wilayah, struktur organisasi dan aktivitas Bappeda.

##### **BAB V : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Pada bab ini penulis akan membahas hasil dari penulisan dan pembahasan yang dilakukan.

##### **BAB VI : KESIMPULAN DAN SARAN**

Pada bab ini penulis akan memberikan kesimpulan dari hasil penelitian dan saran-saran yang perlu dikemukakan.



## **BAB II**

### **TELAAH PUSTAKA**

#### **2.1 Kerangka Teori**

Kerangka teori merupakan teori-teori yang relevan yang dapat digunakan untuk menjelaskan tentang variabel yang akan diteliti serta sebagai dasar untuk memberi jawaban sementara terhadap rumusan masalah yang diajukan (hipotesis) dan penyusunan instrumen penelitian (Sugiyono, 2005 : 326). Pada suatu proses penelitian ilmiah sebagai langkah untuk memperdalam kajian terhadap suatu persoalan secara objektif, maka fungsi kerangka teori sangat membantu dalam menentukan tujuan dan arah serta konsep yang tepat. Dengan demikian dalam pemecahan masalah akan tampak lebih jelas sesuai dengan teori itu sendiri.

Maka dari itu penulis memulai dari mendefinisikan persoalan sesuai dengan teori-teori yang relevan agar dapat mendukung pemecahan dalam penelitian penulis.

##### **2.1.1 Pelaksanaan Tugas**

Pelaksanaan tugas merupakan proses implementasi program agar bisa dijalankan oleh seluruh pihak dalam organisasi serta proses memotivasi agar semua pihak tersebut dapat menjalankan tanggung jawabnya dengan penuh kesadaran dan produktifitas tinggi.

Istilah pelaksanaan merupakan salah satu tahap dari manajemen atau pengelolaan. Pelaksanaan merupakan realisasi dari apa yang telah direncanakan.

Dengan kata lain, pelaksanaan merupakan langkah kedua setelah perencanaan. Sebagaimana dikemukakan oleh Umberto Sihombing (1999:132) bahwa pelaksanaan adalah operasionalisasi dari apa yang direncanakan. Depdikbud (2002:1020) menyatakan bahwa pelaksanaan atau penyelenggaraan diartikan sebagai proses, cara, perbuatan menyelenggarakan dalam berbagai arti (pelaksanaan). Dengan suatu uraian tugas yang jelas, diharapkan setiap orang akan memahami dan menerima peran yang ditetapkan baginya, sehingga dapat dan mau melaksanakan tugasnya dengan baik. Yang dimaksud dengan pelaksanaan tugas menurut Arifin (2001 : 25) adalah kewajiban untuk melaksanakannya.

Menurut Tisnowati Sule (2006:216) dijelaskan bahwa memandang sumber daya manusia berarti juga memandang bahwa selain mereka adalah tenaga kerja perusahaan, juga merupakan individu-individu yang memiliki karakteristiknya masing-masing. Jika demikian halnya, maka karakteristik individu akan sangat menentukan bagaimana langkah implementasi akan dijalankan. Bisa disimpulkan bahwa implementasi dari rencana organisasi sangat bergantung kepada karakteristik individu yang terdapat dalam organisasi. Oleh karena itu, perusahaan perlu memahami lebih jauh mengenai karakteristik individu tersebut, termasuk sikap dan perilaku dari setiap individu di organisasi.

Seseorang yang dapat memahami perannya dan menerima perannya, tentu akan secara konsekuen melaksanakan semua tugas yang melekat pada perannya ini dengan sebaik-baiknya. Tugas bukan dipandang sebagai beban yang memberatkan atau menjemukan, melainkan merupakan suatu tantangan yang

menarik untuk diselesaikan dan mungkin akan menimbulkan suatu kepuasan diri jika dapat menyelesaikannya.

Menurut Mochd. As'ad (2000 : 65) mengatakan pelaksanaan tugas adalah hasil kerja yang dapat dicapai oleh seorang menurut ukuran yang berlaku untuk pekerjaan yang bersangkutan. Pelaksanaan tugas tersebut menurut As'ad dapat dibagi:

- a. Kualitas Pekerjaan
- b. Kuantitas Pekerjaan
- c. Waktu Pekerjaan
- d. Jabatan Yang Dipegang
- e. Absensi Kerja
- f. Keselamatan Dalam Menjalankan Pekerjaan

Sedangkan menurut Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2005 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kabupaten Bengkalis, tugas pokok Bappeda adalah Membantu Kepala Daerah dalam menyelenggarakan sebagian tugas umum pemerintah dan pembangunan dibidang perencanaan pembangunan daerah.

Beberapa pelaksanaan tugas Bappeda serta yang diharapkan tumbuh dan berkembang adalah meliputi:

- a. Tugas dalam pemikiran/perencanaan. Sebagai contoh mengadakan perencanaan yang dapat menggambarkan suatu pandangan masa depan yang lebih baik dari yang sekarang, dimana rencana tersebut juga betul-betul dapat menyentuh kepada kebutuhan masyarakat itu sendiri. Suatu pembangunan yang tujuannya

adalah untuk merubah keadaan yang telah ada menjadi lebih baik dengan sendirinya masyarakat akan timbul niatnya secara spontan untuk memberikan dukungan dalam pelaksanaan pembangunan dengan tujuan agar keadaan yang diharapkan dapat segera tercapai/ terwujud dan dapat langsung dinikmati.

- b. Tugas dalam pengumpulan data. Disini maksudnya seluruh data yang dikumpulkan dan diolah untuk bahan acuan dalam membuat rencana pembangunan akan lebih cepat terwujudnya/terlaksananya pembangunan.
- c. Tugas dalam pelaksanaan pembangunan, yang dimaksud disini adalah turut dalam merencanakan serta melakukan evaluasi pembangunan yang telah dilaksanakan. Sehingga dapat di ketahui kendala-kendala yang menyebabkan terhambatnya pembangunan dapat diatasi.
- d. Tugas dalam penilaian/melakukan evaluasi, yang dimaksud adalah segala pembangunan yang di rencanakan, dilaksanakan dapat di evaluasi sebagai pertmbahan bagi perencanaan pembangunan daerah selanjutnya.

### **2.1.2 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA)**

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) merupakan badan yang dibentuk oleh kepala daerah yang tugasnya membantu kepala daerah dalam menyelenggarakan sebagian tugas umum pemerintah dan pembangunan dibidang perencanaan pembangunan daerah.

Untuk Kabupaten Bengkalis khususnya, badan ini dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2005 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kabupaten Bengkalis.

Menurut S.P. Siagian (2005 : 37) mengemukakan bahwa organisasi adalah sekelompok orang yang terikat secara formal dan hierarkis serta bekerja sama untuk mencapai tujuan tertentu yang telah ditetapkan sebelumnya.

Mengingat bahwa organisasi dan manajemen bagian dari administrasi maka (S.P. Siagian) mengemukakan konsep administrasi adalah keseluruhan proses pelaksanaan dari keputusan-keputusan yang telah diambil dan pelaksanaan itu pada umumnya dilakukan oleh dua orang manusia atau lebih untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya.

Dalam rangka pencapaian sebuah tujuan yang diinginkan suatu organisasi, maka manajemen merupakan salah satu alat dalam pencapaian tersebut. Manajemen yang baik akan mempermudah terwujudnya tujuan perusahaan, karyawan, pegawai, dan masyarakat. Harold koontz dalam Manullang (2001 : 42) menyebutkan bahwa fungsi manajemen adalah Perencanaan (*Planing*), Pengorganisasian (*Organizing*), Pengarahan (*Directing*), dan Pengawasan (*Kontrolling*).

Untuk menggerakkan semua anggota organisasi, diperlukan seorang pemimpin/ketua yang mempunyai jangkauan jauh ke depan dan dapat mengantisipasi semua permasalahan yang akan timbul baik sekarang maupun dimasa yang akan datang. Seorang pemimpin akan berhasil dengan baik apabila pemimpin tersebut dapat menerapkan fungsi kepemimpinan sebagai berikut:

- a. Ing madyo bangun karso
- b. Tut wuri handayani

- b. Bawahan akan timbul pikiran masa bodoh terhadap tugasnya, sehingga penyelesaian pekerjaan akan tertunda beberapa waktu.
- c. Kualitas pekerjaan menjadi rendah.
- d. Untuk itu diharapkan pengawasan yang efektif sangat diperlukan agar semua kegiatan dapat berjalan dengan baik dan tepat waktu serta tepat guna. Sebagai implementasi perencanaan, menurut Tjokroamidjojo (2003 : 112) dapat dibagi dua bagian:
  1. Apabila ada rencana, maka rencana tersebut harus benar-benar dilaksanakan. Hal ini penting karena kenyataannya banyak rencana-rencana yang merupakan *window dressing* belaka.
  2. Kecuali didalam perencanaan itu sendiri harus terdapat suatu sifal atau cara yang lebih menjamin rencana tersebut dapat dilaksanakan.

Untuk itu, dalam hal pembangunan oleh Bappeda dalam pelaksanaannya diperlukan suatu manajemen yang baik untuk menggerakkan semua potensi yang ada.

### 2.1.3 Pembangunan

Untuk mencapai hasil maksimal pembangunan, dimulai dari proses perencanaan, pelaksanaan hingga selesainya pembangunan, yang kata kuncinya diperlukan pengelolaan secara sistematis. Dalam konteks ini, sistem manajemen pemerintahan sebagai perangkat integral dan melekat dengan pengelolaan pembangunan berfungsi untuk memperbaiki tingkat kesejahteraan masyarakat. Seiring dengan itu, aspek kemampuan aparat pemerintahan sebagai penentu dan

penyelenggara manajemen pemerintahan harus dapat menciptakan nilai keadilan dalam proses pembangunan. Nilai keadilan itu berkaitan dengan pemenuhan hak-hak warga negara yang harus terlayani secara menyeluruh oleh pemerintah. Untuk menyelenggarakan fungsi pemerintahan dan pembangunan dibutuhkan kemampuan manajerial aparat pemerintah yang handal dalam usaha memberikan kepuasan bagi masyarakat melalui pelaksanaan pembangunan sesuai tujuan keberadaan institusi pemerintahan sebagai organisasi publik.

Soetomo (2009:166) mengartikan pembangunan masyarakat adalah proses perubahan menuju pada suatu kondisi yang lebih baik. Kondisi kehidupan yang lebih baik tersebut secara lebih konkret sering disebut juga dengan peningkatan taraf hidup masyarakat atau peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Dengan demikian, peningkatan taraf hidup dapat pula dianggap sebagai tujuan yang hendak dicapai melalui proses pembangunan masyarakat. Maka menurut Soetomo dikatakan peningkatan taraf hidup dianggap sebagai tujuan maka sebetulnya juga dapat diposisikan sebagai indikator untuk melihat keberhasilan proses pembangunan masyarakat tersebut.

Sebagaimana telah disebutkan tentang pengertian pembangunan masyarakat, Soetomo (2009:168) mengatakan bahwa pembangunan cenderung dinyatakan cukup membawa hasil apabila mampu untuk mengurangi proporsi jumlah penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan.

Sudjana (2001:265) pembangunan masyarakat adalah proses dinamisasi, demokratisasi, dan modernisasi. Proses dinamisasi dimaksudkan bahwa pembangunan masyarakat adalah kegiatan edukatif untuk membangkitkan

peraserta masyarakat. Program-program pembangunan masyarakat akan berhasil dengan baik apabila dapat melibatkan semua potensi yang ada di masyarakat untuk mencapai kemajuan masyarakat itu sendiri. Proses modernisasi berarti bahwa pembangunan masyarakat ialah upaya meningkatkan kualitas masyarakat dalam semua aspek kehidupan dengan titik berat pada peningkatan aspek sosial dan ekonomi.

Dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa pembangunan masyarakat adalah proses perubahan menuju pada suatu kondisi yang lebih baik. pembangunan cenderung dinyatakan cukup membawa hasil apabila mampu untuk mengurangi proporsi jumlah penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan.

#### **2.1.4 Perencanaan Pembangunan**

Menghadapi realitas kehidupan yang menunjukkan adanya kesenjangan kesejahteraan mengakibatkan adanya pekerjaan berat kepada para ahli pembangunan termasuk di dalamnya para pembuat kebijakan. Ini dimaksudkan untuk mengatasi berbagai persoalan yang muncul akibat kesenjangan kesejahteraan, perlu dilakukan upaya pembangunan yang terencana.

Upaya pembangunan yang terencana dapat dilakukan untuk mencapai tujuan pembangunan yang dilakukan. Lebih jauh lagi berarti perencanaan yang tepat sesuai dengan kondisi di suatu wilayah menjadi syarat mutlak dilakukannya usaha pembangunan.

Disamping itu karena perencanaan merupakan pekerjaan yang menyangkut wilayah publik maka komitmen seluruh pemangku kepentingan



(stake holder) yang terlibat sangat dibutuhkan sehingga hasil perencanaan dapat dibuktikan dan dirasakan manfaatnya.

Menurut Tjokroamidjojo (1992 : 14), perencanaan dalam arti seluas-luasnya tidak lain adalah suatu proses mempersiapkan secara sistematis kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan untuk mencapai sesuatu tujuan tertentu. Perencanaan adalah suatu cara bagaimana mencapai tujuan sebaik-baiknya dengan sumber-sumber yang ada supaya lebih efisien dan efektif.

“Melihat ke depan dengan mengambil pilihan berbagai alternative dari kegiatan untuk mencapai tujuan masa depan tersebut dengan terus mengikuti supaya pelaksanaan tidak menyimpang tujuan”, Albert Waterston mendefinisikan perencanaan pembangunan seperti demikian.

Berbagai ahli memberikan definisi perencanaan. Bahkan ada yang memberikan pengertian lebih luas contohnya Jan Tinbergen mengemukakan lebih kepada kebijaksanaan pembangunan (development policy) bukan hanya perencanaan (plans) semata.

Perencanaan dapat dilakukan dalam berbagai bidang. Namun tidak semua rencana merupakan perencanaan pembangunan terkait dengan kebijaksanaan pembangunan maka pemerintah berperan sebagai pendorong pembangunan (agent of development), ini terkait dengan definisi perencanaan yang merupakan upaya institusi public untuk membuat arah kebijakan pembangunan yang harus dilakukan di sebuah wilayah baik negara maupun di daerah dengan didasarkan keunggulan dan kelemahan yang dimiliki oleh wilayah tersebut.

Perencanaan pembangunan memiliki ciri khusus yang bersifat usaha pencapaian tujuan pembangunan tertentu. Adapun ciri dimaksud antara lain (Ijokroamidjojo, 1996 : 86) :

1. Suatu perencanaan pembangunan adalah usaha yang diceminkan dalam rencana untuk mencapai perkembangan social ekonomi yang tetap (steady social economy growth). Hal ini dicerminkan oleh dalam usaha peningkatan produksi nasional, berupa tingkat laju pertumbuhan ekonomi yang positif.
2. Usaha yang dicerminkan dalam rencana meningkatkan pendapatan perkapita. Laju pertumbuhan ekonomi yang positif, yaitu setelah dikurangi dengan laju pertumbuhan penduduk menunjukkan pula kenaikan pendapatan per kapita.
3. Usaha mengadakan perubahan struktur ekonomi yang mendorong peningkatan struktur ekonomi agraris menuju struktur industri.
4. Adanya perluasan kesempatan kerja
5. Adanya pemerataan pembangunan yang meliputi pemerataan pendapatan dan pembangunan antara daerah.
6. Adanya usaha pembinaan lembaga ekonomi masyarakat yang lebih menunjang kegiatan pembangunan.
7. Upaya membangun secara bertahap dengan berdasar kemampuan sendiri/nasional.
8. Usaha terus menerus menjaga stabilitas ekonomi.

Implementasi otonomi daerah dan desentralisasi di Indonesia menuntut perubahan paradigma perencanaan dan keuangan daerah yang bersifat

komprehensif mengarah kepada transparansi, akuntabilitas, demokratisasi, desentralisasi dan partisipasi masyarakat.

Dapat dikatakan bahwa dari seluruh pembangunan yang ada di kecamatan selalu mengarah pada pembangunan yang dapat menumbuhkan pertumbuhan ekonomi. Oleh karena itu proses pembangunan di kecamatan memerlukan konsep kebijaksanaan yang dituangkan dalam perencanaan serta tahap pelaksanaannya dan konsekwensinya adalah untuk mencapai hasil yang lebih baik.

Sehubungan dengan hal itu maka diperlukan manajemen yang tepat dan efisiensi kerja serta dimulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan penelitian. Agar proses itu dapat berjalan lancar perlu adanya perencanaan yang matang berikut organisasi yang tepat, berjalan dengan harmonis dan dikelola oleh pelaksana yang mempunyai loyalitas dan berdedikasi yang tinggi. Menurut S.P Siagian (2003; 112) mengemukakan konsep perencanaan sebagai berikut :

- a. Rencana harus mempermudah tercapainya tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Karena rencana adalah suatu keputusan yang menentukan kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan dalam rangka usaha pencapaian tujuan maka kiranya tidak sulit untuk melihat adanya hubungan yang erat antara rencana dan tujuan.
- b. Rencana harus bersifat praktis, maksudnya suatu rencana harus dapat dicapai dengan memperhitungkan tujuan, kapasitas organisasi, faktor lingkungan dan kemungkinan-kemungkinan yang akan timbul.
- c. Rencana harus disertai dengan suatu perincian yang terinci dan teliti. Bersama dengan hal ini harus sudah disertai program yang rinci dan mendetail serta

rumusan berbagai kegiatan yang menyangkut aspek organisasi, tata cara, metode kerja, pembiayaan, target hasil, penggunaan tenaga kerja dan sistim pengawasang yang dipergunakan.

- d. Rencana harus merupakan ramalan. Oleh karena itu rencana akan dilaksanakan di masa yang akan datang, maka rencananya itu harus merupakan ramalan atas keadaan yang akan terjadi.

Menurut Mappajandji (2005) akibat dinamika science dalam memandang semesta maka telah terjadi pergeseran paradigama dalam menentukan model perencanaan. Selanjutnya konsep perencanaan membutuhkan redefinisi elemen-elemen dalam proses perencanaan. Elemen-elemen tersebut dalam mempertahankan pengaruh lingkungan memiliki cara dan seni tersendiri yang berbeda antara elemen satu dengan elemen yang lain. Cara atau seni beradaptasi dengan lingkungan tersebut akan bertahan apabila ada nilai-nilai yang diyakini oleh elemen-elemen tersebut.

Perencanaan menurut paradigama baru disamping menggunakan kaca mata pendekatan ilmiah (rasionalitas) dituntut juga mempertimbangkan nilai-nilai yang berkembang dalam komunitas masyarakat agar dalam menyusun alternatif kebijakan tepat sasaran dan dapat dilaksanakan.

Merujuk pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia. Pembangunan dalam UU ini

Pembangunan Nasional dimaksud upaya yang dilaksanakan oleh semua komponen bangsa dalam rangka mencapai tujuan bernegara.

Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) itu sendiri adalah satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat di tingkat pusat dan daerah.

Tujuan perencanaan pembangunan nasional menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, antara lain :

1. Mendukung koordinasi antarpelaku pembangunan
2. Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik antar-daerah, antar-ruang, antar-waktu, antar-fungsi pemerintah maupun antara Pusat dan Daerah
3. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan
4. Mengoptimalkan partisipasi masyarakat dan menjamin tercapainya penggunaan sumberdaya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan.

## **2.2 Definisi Konsep**

Konsep adalah abstraksi mengenai suatu fenomena yang dirumuskan atas dasar generalisasi dari sejumlah karakteristik kejadian, keadaan, kelompok atau individu tertentu (Masri Singarimbun, 2006 : 34).

Untuk memberikan batasan-batasan yang lebih jelas dari masing-masing konsep guna menghindari adanya salah pengertian, maka definisi beberapa konsep yang dipakai dalam penelitian ini akan dikemukakan sebagai berikut :

1. Analisis Pelaksanaan Tugas adalah kajian tentang hasil kerja yang dicapai oleh seseorang pegawai dalam melaksanakan tugas yang diberikan kepadanya. Dalam hal ini yang menjadi sorotan adalah hasil kerja yang dicapai oleh pegawai Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bengkalis.
2. BAPPEDA merupakan badan yang dibentuk oleh kepala daerah yang tugasnya membantu kepala daerah dalam menyelenggarakan sebagian tugas umum pemerintah dan pembangunan dibidang perencanaan pembangunan daerah.
3. Pembangunan adalah suatu proses atau usaha yang terencana dan sadar yang dilakukan suatu organisasi untuk mewujudkan pertumbuhan dan perubahan.
4. Pembangunan fisik adalah suatu usaha yang terencana dan sadar yang dilakukan suatu organisasi untuk mewujudkan pertumbuhan dan perubahan yang secara nyata dapat dilihat dan dirasakan manfaatnya oleh seseorang.
5. Tugas dalam pemikiran/perencanaan. Sebagai contoh mengadakan perencanaan yang dapat menggambarkan suatu pandangan masa depan yang lebih baik dari yang sekarang, sehingga benar-benar dirinci apa saja yang akan direncanakan sehingga dimana rencana tersebut juga betul-betul dapat menyentuh kepada kebutuhan masyarakat itu sendiri. Suatu pembangunan yang tujuannya adalah untuk merubah keadaan yang telah ada menjadi lebih baik dengan sendirinya masyarakat akan timbul niatnya secara spontan untuk memberikan dukungan

dalam pelaksanaan pembangunan dengan tujuan agar keadaan yang diharapkan dapat segera tercapai/ terwujud dan dapat langsung dinikmati.

6. Tugas dalam pengumpulan data. Disini maksudnya seluruh data yang dikumpulkan dan diolah untuk bahan acuan serta data tersebut benar-benar dapat diterima dalam membuat rencana pembangunan sehingga akan lebih cepat terwujudnya/terlaksananya pembangunan.
7. Tugas dalam pelaksanan pembangunan, yang dimaksud disini adalah turut dalam merencanakan, melaksanakan serta pembangunan yang telah dilaksanakan selesai tepat waktu.
8. Tugas dalam penilaian/melakukan evaluasi, yang dimaksud adalah segala pembangunan yang dilaksanakan dapat di evaluasi, di monitoring serta di lakukan koordinasi sebagai pertimbangan bagi perencanaan pembangunan daerah selanjutnya.

### 2.3 Definisi Operasional

Menurut Masri Singarimbun (2000 : 46) operasional merupakan unsur-unsur yang memberikan bagaimana cara mengukur suatu variabel sehingga dengan pengukuran tersebut dapat diketahui indikator-indikator apa saja sebagai pendukung untuk dianalisis dari variabel tersebut.

Dalam penulisan proposal penelitian ini, peneliti membuat variabel dengan beberapa indikator. Adapun variabel dalam penelitian ini adalah Analisis Pelaksanaan Tugas Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dalam Perencanaan Pembangunan Fisik di Kecamatan Bengkalis. Dengan indikator sebagai berikut :

- a. Pelaksanaan Tugas
- b. Perencanaan Pembangunan

## 2.4 Teknik Pengukuran

Pada penelitian ini untuk melihat faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan tugas Bappeda dalam perencanaan pembangunan fisik di Kecamatan Bengkalis, maka teknik pengukuran ditinjau dari aspek sebagai berikut:

### 1. Tugas dalam perencanaan, meliputi:

- a. Kemampuan untuk pencapaian tujuan
- b. Kemampuan dalam merincikan
- c. Dapat dijadikan sebagai ramalan

Baik : Apabila dalam pelaksanaan tugas, dalam perencanaan memenuhi 3 (tiga) kriteria diatas.

Cukup : Apabila dalam pelaksanaan tugas, dalam perencanaan memenuhi 2 (dua) dari kriteria diatas.

Kurang baik : Apabila dalam pelaksanaan tugas, dalam perencanaan memenuhi 1 (satu) atau tidak sama sekali dari kriteria diatas.

### 2. Tugas dalam pengumpulan data, meliputi:

- a. Kemampuan dalam pengolahan data
- b. Dapat dijadikan sebagai bahan acuan
- c. Kemampuan untuk diterima dalam membuat rencana pembangunan



- Baik** : Apabila dalam pelaksanaan tugas, dalam pengumpulan data memenuhi 3 (tiga) kriteria diatas.
- Cukup** : Apabila dalam pelaksanaan tugas, dalam pengumpulan data memenuhi 2 (dua) dari kriteria diatas.
- Kurang baik** : Apabila dalam pelaksanaan tugas, dalam pengumpulan data memenuhi 1 (satu) atau tidak sama sekali dari kriteria diatas.

3. Tugas dalam pelaksanaan pembangunan, meliputi:

- a. Kemampuan dalam merencanakan
- b. Mempunyai kewenangan melaksanakan
- c. Kemampuan untuk menyelesaikan pekerjaan tepat waktu

- Baik** : Apabila dalam pelaksanaan tugas, dalam pelaksanaan pembangunan memenuhi 3 (tiga) kriteria diatas.
- Cukup** : Apabila dalam pelaksanaan tugas, dalam pelaksanaan pembangunan memenuhi 2 (dua) dari kriteria diatas.
- Kurang baik** : Apabila dalam pelaksanaan tugas, dalam pelaksanaan pembangunan memenuhi 1 (satu) atau tidak sama sekali dari kriteria diatas.

4. Tugas dalam penilaian, meliputi:

- a. Kemampuan untuk mengevaluasi
- b. Mempunyai kewenangan dalam monitoring pekerjaan
- c. Memiliki kemampuan untuk berkoordinasi

- Baik : Apabila dalam pelaksanaan tugas, dalam penilaian memenuhi 3 (tiga) kriteria diatas.
- Cukup : Apabila dalam pelaksanaan tugas, dalam penilaian memenuhi 2 (dua) dari kriteria diatas.
- Kurang baik : Apabila dalam pelaksanaan tugas, dalam penilaian memenuhi 1 (satu) atau tidak sama sekali dari kriteria diatas.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **3.1 Jenis Penelitian**

Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif, yaitu menggambarkan secara umum kenyataan yang ada di lapangan yang sesuai dengan permasalahan yang diteliti. Maka penulis mengadakan pengumpulan data dengan cara membuat beberapa pertanyaan yang akan diberikan kepada responden dari setiap jenis populasi dan secara langsung terjun kelapangan dalam hal mengumpulkan data yang di perlukan.

Hal ini bertujuan untuk memperoleh informasi keadaan saat ini yang berkaitan dengan variabel yang menyebabkan suatu gejala atau kenyataan sosial.

#### **3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian**

Lokasi penelitian ini adalah Kantor Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau. Penelitian ini akan dilaksanakan pada bulan Januari – Maret 2010.

#### **3.3 Populasi dan Sampel**

##### **1. Populasi**

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek/ subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2005 : 90).

Pada penelitian ini, yang menjadi populasi adalah seluruh pegawai yang bekerja pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Bengkalis.

## 2. Sampel

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Untuk sampel penulis menggunakan teknik sensus atau dengan kata lain seluruh populasi penulis jadikan sebagai responden. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

**Tabel 1.4 Keadan Populasi dan Sampel Penelitian di Kecamatan Bengkalis**

No	Jabatan	Populasi	Sampel	Persentase
1.	Camat	1	1	100
2.	Kepala Bappeda	1	1	100
3.	Sekretaris	1	1	100
4.	Kepala Sub Bagian	4	4	100
5.	Kepala Bidang	8	8	100
6.	Kepala Sub Bidang	3	3	100
7.	Staf Pegawai	33	33	100
	Jumlah	51	51	100

Sumber data : Bappeda Kabupaten Bengkalis Tahun 2009

### 3.5 Teknik Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data yang benar dan relevan dengan penelitian ini, maka penulis menggunakan beberapa teknik pengumpulan data, antara lain :

1. Observasi, yaitu pengamatan langsung pada objek penelitian hal ini untuk mengamati dan mengungkapkan masalah yang ada tentang perencanaan pembangunan di Kecamatan Bengkalis.
2. Wawancara, yaitu mengadakan tanya jawab langsung dengan responden tentang data yang diberikan oleh responden dimana pertanyaan yang akan diajukan telah disiapkan secara terlebih dahulu.
3. Kuesioner, yaitu penulis membuat daftar pertanyaan dan diajukan kepada responden sehubungan dengan permasalahan yang diteliti.

### 3.6 Hipotesis

Hipotesis diartikan sebagai jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian (Sugiyono, 2005 : 183). Hipotesis adalah prinsip yang logis dan dapat diterima secara rasional tanpa mempercayainya sebelum diuji terlebih dahulu kebenarannya. Berdasarkan penjelasan latar belakang dan landasan teori di atas, diduga bahwa pelaksanaan tugas Badan Perencanaan Pembangunan Kabupaten Bengkalis dalam perencanaan pembangunan fisik di Kecamatan Bengkalis berjalan kurang optimal.

## **BAB IV**

### **GAMBARAN UMUM**

#### **4.1 Gambaran Umum Kabupaten Bengkalis**

##### **4.1.1 Letak Geografis**

Kabupaten Bengkalis dibentuk dengan UU Nomor 12 Tahun 1956 Lembaran Negara Nomor 25 Tahun 1956 dengan ibukotanya Bengkalis. Tahun 1999 Kota Administrasi Dumai meningkat statusnya menjadi Kota Dumai yang membawahi 3 (tiga) Kecamatan yaitu Kecamatan Dumai Barat, Kecamatan Dumai Timur dan Kecamatan Bukit Kapur. Tahun 2000 terjadi pemekaran, Kabupaten Bengkalis ini dimekarkan menjadi 3 Kabupaten yaitu Kabupaten Bengkalis, Kabupaten Bengkalis dan Kabupaten Rokan Hilir.

Dengan dimekarkannya Kecamatan Mandau dan Kecamatan Bukit Batu pada tahun 2003, maka secara administrasi Pemerintahan Kabupaten Bengkalis dibagi dalam 8 Kecamatan yang terdiri dari 105 Desa/Kelurahan yaitu :

1. Kecamatan Bengkalis (20 Desa/Kelurahan)
2. Kecamatan Bantan (9 Desa/Kelurahan)
3. Kecamatan Bukit Batu (15 Desa/Kelurahan)
4. Kecamatan Siak Kecil (13 Desa/Kelurahan)
5. Kecamatan Rupert (12 Desa/Kelurahan)
6. Kecamatan Rupert Utara (5 Desa/Kelurahan)
7. Kecamatan Mandau (15 Desa/Kelurahan)
8. Kecamatan Pinggir (15 Desa/Kelurahan)

Kabupaten Bengkalis terletak pada bagian timur Pulau Sumatera dari kepulauan. Kabupaten Bengkalis merupakan wilayah yang strategis karena berhadapan langsung dengan air pelayaran internasional yang paling ramai di dunia, yaitu Selat Malaka serta berada dalam kawasan segitiga pertumbuhan, yakni segitiga pertumbuhan Ekonomi-Indonesia-Malaysia (IMS-GT) dan Indonesia-Malaysia-Thailand (IMT-GT)

Secara geografis Kabupaten Bengkalis terletak antara 230-017 Lintang Utara, 10052-10210 Bujur Timur, dengan batas-batas berikut sebelah Utara berbatasan dengan Selat Melaka.

- Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Bengkalis
- Sebelah Barat berbatasan dengan Kota Dumai dan Kabupaten Rokan Hilir
- Sebelah Timur berbatasan dengan Propinsi Kepulauan Riau dan Kabupaten Pelalawan.

Sedangkan untuk kecamatan Bengkalis itu sendiri sebagai berikut:

- Sebelah Utara Berbatasan dengan Kecamatan Bantan
- Sebelah Selatan Berbatasan dengan Selat Bengkalis
- Sebelah Barat Berbatasan dengan Selat Bengkalis
- Sebelah Timur Berbatasan dengan Kecamatan Bantan

#### **4.1.2 Keadaan Alam**

Kabupaten Bengkalis beriklim tropis, dengan curah hujan tahun 2009 rata-rata berkisar antara 678,3 -- 1.276,5 mm/tahun dengan temperatur udara berkisar antara 26-320 C. Musim kemarau umumnya terjadi pada bulan Februari s/d

Agustus, sedangkan musim penghujan terjadi pada bulan September s/d Januari dengan jumlah hari hujan pada tahun 2007 berkisar antara 25-63 hari/tahun.

#### 4.1.3 Keadaan Penduduk

Kecamatan Bengkalis merupakan Ibukota dari Kabupaten Bengkalis yang mana Kecamatan ini terletak diluar pulau Sumatera yaitu pulau Bengkalis. Penduduk Kecamatan Bengkalis pada tahun 2009 berjumlah 83.794 jiwa yang menyebar di 3 (tiga) kelurahan dan 16 (Enam Belas) Desa. Untuk lebih jelasnya, dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 4.1. Kelurahan dan Desa di Kecamatan Bengkalis**

NO.	NAMA KELURAHAN/ DESA	LUAS (km2)	PENDUDUK	KET
1.	BENGKALIS	2	7.503	Nomor 1 sampai dengan nomor 3 merupakan kelurahan yang ada di Kecamatan Bengkalis, sedangkan nomor 4 sampai dengan 19 adalah desa yang ada di Kecamatan Bengkalis.
2.	RIMBASEKAMPUNG	23	2.332	
3.	DAMON	2.5	6.931	
4.	WONOSARI	20	6.324	
5.	SENGGORO	20	6.216	
6.	AIR PUTIH	15	2.573	
7.	KELAPAPATI	10	8.329	
8.	SUNGAI ALAM	23	5.523	
9.	PEDEKIK	35	5.523	
10.	PANGKALAN BATANG	38	4.291	
11.	SEBAUK	31	2.884	
12.	TELUK LATAK	23	2.775	
13.	MESKOM	51	4.759	
14.	PENAMPI	16	2.559	
15.	TAMERAN	29	4.042	
16.	PENEBAL	32	1.917	
17.	PEMATANG DUKU	46	3.844	
18.	KETAM PUTIH	27	3.309	
19.	KELEMANTAN	30	2.160	

Sumber: [www.bengkalis.go.id](http://www.bengkalis.go.id) – Bagian Pengolahan Data Elektornik (PDE 2004-2009)



Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa di Kecamatan Bengkalis memiliki Tiga Kelurahan yang terdiri dari Kelurahan Bengkalis, Kelurahan Rimba Sekampung dan Kelurahan Damon. Dari Tiga Kelurahan tersebut tercatat jumlah penduduk yang paling besar adalah yang ada di Kelurahan Bengkalis dengan jumlah penduduk sekitar 7.503 jiwa dengan luas 2Km<sup>2</sup> dan diikuti oleh Kelurahan Damon yang menjadi peringkat kedua yang memiliki jumlah jiwa besar yang ada di Kecamatan Bengkalis dengan jumlah penduduk sekitar 6.931 jiwa dengan luas wilayah 2Km<sup>2</sup> serta Kelurahan Rimbasekampung yang memiliki luas wilayah terluas yaitu sekitar 23Km<sup>2</sup> namun hanya dihuni oleh 2.332 jiwa. Sedangkan Desa yang ada di Kecamatan Bengkalis terdiri dari 16 Desa yaitu Desa Wonosari, Senggoro, Air Putih, Kelapapati, Sungai Alam, Pedekik, Pangkalan Batang, Sebauk, Teluk Latak, Meskom, Penampi, Tameran, Penebal, Pematang Duku, Ketam Putih, Kelomantan. Desa-desa tersebut menyebar di seluruh pulau Bengkalis. Dari 16 desa tersebut tercatat memiliki jumlah jiwa sekitar 67.028 jiwa.

#### **4.1.4 Luas Wilayah**

Luas wilayah Kabupaten Bengkalis 11.481,77 KM yang terdiri dari wilayah daratan dan perairan. Jika dirinci luas wilayah menurut Kecamatan dan dibandingkan dengan luas Kabupaten Bengkalis, ternyata menurut Kecamatan Pinggir merupakan Kecamatan yang terluas yaitu 2.503,00 KM dan Kecamatan yang terkecil adalah Kecamatan Bantan dengan luas 424,40 KM.

Untuk lebih jelasnya Luas Daerah Kabupaten Bengkalis menurut Kecamatan adalah sebagai berikut:

**Tabel 4.2 Luas Wilayah Kabupaten Bengkalis Menurut Kecamatan**

No	Kecamatan	Desa/Kelurahan	Luas (KM <sup>2</sup> )
1	Bengkalis	19	514,00
2	Bantan	9	424,40
3	Bukit Batu	15	1.128,00
4	Siak Kecil	13	742,21
5	Rupat	12	896,35
6	Rupat Utara	5	628,50
7	Mandau	15	937,47
8	Pinggir	13	2.503,00

Sumber: [www.bengkalis.go.id](http://www.bengkalis.go.id) – Bagian Pengolahan Data Elektronik  
(PDE 2004-2009)

Dari tabel diatas, dapat kita jelaskan bahwa Kabupaten Bengkalis terdiri dari 8 (Delapan) Kecamatan yang mana Kecamatan tersebut terpisah di 3 (Tiga) pulau berbeda, yaitu Pulau Sumatera, Pulau Bengkalis dan Pulau Rupat. Untuk Pulau Sumatera, terdiri dari Kecamatan Bukit Batu dengan luas wilayah 1.128,00 Km<sup>2</sup> dan 15 (Lima Belas) Desa/ Kelurahan, Kecamatan Siak Kecil dengan luas wilayah 742,21 Km<sup>2</sup> dan 13 (Tiga Belas) Desa/ Kelurahan, Kecamatan Mandau dan Kecamatan Pinggir dengan Luas wilayah sekitar 3.440,47 Km<sup>2</sup> dan 28 Desa/ Kelurahan. Sementara untuk di Pulau Rupat terdiri dari 2 (Dua) Kecamatan, yaitu Kecamatan Rupat dengan luas wilayah 896,35 Km<sup>2</sup> dan 12 Desa/ Kelurahan serta Kecamatan Rupat Utara yang memiliki luas 628,50 Km<sup>2</sup> dan 5 Desa/ Kelurahan. Sedangkan untuk di Pulau Bengkalis sendiri terdiri dari 2 (Dua) Kecamatan, yaitu Kecamatan Bengkalis dan Kecamatan Bantan.

#### **4.1.5 Kondisi Perekonomian**

Kecamatan Bengkalis hingga kini masih menjadi Pusat Pemerintahan Kabupaten Bengkalis. Pulau Bengkalis yang terdiri dari 2 (Dua) Kecamatan yang terdiri dari Kecamatan Bengkalis dan Kecamatan Bantan kondisi perekonomiannya bergantung pada perdagangan, perkebunan, perikanan dan juga pemerintahan. Untuk Kecamatan Bengkalis sendiri, rata-rata masyarakatnya bergantung pada pemerintahan karena mayoritas masyarakat di Kecamatan tersebut berprofesi sebagai Pegawai Negeri dan tenaga honorer serta perdagangan. Sementara di Kecamatan Bantan, kondisi perekonomiannya bergantung pada perairan, perkebunan yang berprofesi sebagai nelayan dan petani karet, kelapa sawit, kelapa, sagu dan kopi.

Nilai ekspor di Kecamatan Bengkalis melalui pelabuhan Bengkalis hingga juni 2007 mencapai 1.027.057 US \$. Nilai import di kecamatan Bengkalis melalui pelabuhan Bengkalis hingga juni 2007 mencapai 473.346 US\$.

Produksi tanaman perkebunan rakyat dikecamatan bengkalis diantaranya karet 4.389 ton; kelapa sawit 1.963 ton; kelapa 1.914 ton; sagu 5.919 ton; dan kopi 9.27 ton.

#### **4.2 Keadaan Umum/ Sejarah Bappeda Kabupaten Bengkalis**

Bappeda Kabupaten Bengkalis dibentuk melalui keputusan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis nomor 4 tahun 2005 tentang pembentukan organisasi dan tata kerja badan perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Bengkalis pada tanggal 5 Agustus 2005 oleh Bupati Bengkalis H. Syamsurizal.

Bappeda Kabupaten Bengkalis merupakan salah satu satuan kerja perangkat daerah (SKPD) yang mempunyai tugas dan fungsi membantu kepala daerah dalam penyelenggaraan sebagian tugas umum pemerintahan dan pembangunan di bidang perencanaan pembangunan.

Sebagai salah satu satuan kerja perangkat daerah (SKPD) atau lembaga dalam struktur organisasi dan tata kerja pememerintah daerah, maka Banda Perencana Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Bengkalis berkewajiban untuk mewujudkan perencanaan pembangunan yang dilaksanakan secara terus-menerus, berkesinambungan tanpa putus-putus sejalan dengan kedudukan, tugas pokok dan fungsinya, baik kepada masyarakat umum dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Kabupaten Bengkalis.

Dilihat dari aspek perencanaan yang berdasarkan pengukuhan kinerja dan analisa pencapaian kinerja baik itu berupa evaluasi kinerja kegiatan, evaluasi kinerja program maupun evaluasi kinerja kebijaksanaan menunjukkan hasil kinerja yang sangat baik. Keberhasilan ini tidak terlepas dari peranan semua pihak yang ada di lingkup Bappeda Kabupaten Bengkalis, dimana mulai dari unsur pimpinan sampai dengan unsur staf dalam melaksanakan tugas yang diberikan selalu dilaksanakan dengan rasa penuh tanggung jawab, sehingga segala tugas yang dibebankan dapat dilaksanakan dengan baik. Hal ini terwujud berkat adanya dukungan baik dari segenap jajaran pimpinan maupun dukungan berupa sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Bappeda Kabupaten Bengkalis.

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) dipimpin oleh seorang Kepala Badan berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala

Daerah melalui Sekretaris Daerah. BAPPEDA bertugas membantu Kepala Daerah dalam menyelenggarakan sebagian tugas umum Pemerintahan dan Pembangunan dibidang Perencanaan Pembangunan serta penilaian atas pelaksanaannya. Adapun fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) adalah sebagai berikut:

1. Penyusunan Pola Dasar Pembangunan Daerah dan Menyusun Pedoman Pembangunan Daerah yang diwujudkan dalam bentuk rencana strategis (RENSTRA);
2. Penyusunan Rencana Pembangunan Tahunan Daerah (RAPETADA);
3. Penyusun Program Pembangunan Daerah yang akan diusulkan kepada Pemerintah Propinsi untuk dimasukkan kedalam program Pembangunan Propinsi dan atau yang diusulkan kepada Pemerintah untuk dimasukkan kedalam Program Nasional;
4. Penyusunan RAPBD Kabupaten bersama-sama dengan Bagian Keuangan Sekretariat Daerah dengan melakukan koordinasi terhadap lembaga Perangkat Daerah terkait dengan Sekretaris Daerah sebagai koordinator;
5. Pengkoordinasian Perencanaan Pembangunan Daerah terhadap Lembaga Teknis Daerah yang antara lain, Lembaga Sekretariat, Lembaga Teknis Daerah, Dinas Daerah dan organisasi lain dalam lingkup Pemerintah Kabupaten;
6. Pelaksanaan perumusan dan persiapan perencanaan pembangunan secara teknis terhadap perkembangan pembangunan, teknologi dan kebijakan yang

ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten untuk penyempurnaan rencana pembangunan lebih intensif;

7. Pemantauan terhadap pelaksanaan pembangunan;
8. Melaksanakan monitoring serta pengevaluasian terhadap pelaksanaan pembangunan yang telah dilaksanakan;

#### **4.3 Keadaan Pegawai Bappeda Kabupaten Bengkalis**

Penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan sangat tergantung pada kemampuan aparatur pemerintah dalam hal ini pegawai negeri sipil. Keberadaan pegawai negeri sipil sebagai aparatur pemerintah akan memberikan pengaruh besar dalam penyelenggaraan kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan masyarakat.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Bappeda Kabupaten Bengkalis memerlukan aparatur yang bermutu dan bertanggung jawab serta memiliki kemampuan didalam bekerja sehingga menimbulkan suatu kerjasama yang serasi antara pimpinan dan pegawai maupun sesama pegawai.

Selubungan dengan hal diatas, dapat dilihat komposisi pegawai pada Bappeda Kabupaten Bengkalis dalam melaksanakan tugas dan fungsinya berdasarkan klasifikasai, yaitu:

##### **4.3.1 Komposisi Pegawai Menurut Jenis Kelamin**

Keseluruhan jumlah pegawai yang berkerja pada Bappeda Kabupaten Bengkalis adalah berjumlah sebanyak 50. Untuk mengetahui lebih jauh lagi

tentang jumlah pegawai berdasarkan jenis kelamin pada Bappeda Kabupaten Bengkulu dapat dilihat pada tabel berikut ini:

**Tabel 4.3 Komposisi Pegawai Menurut Jenis Kelamin Pada Bappeda Kabupaten Bengkulu**

No	Jenis Kelamin	Jumlah	Persentase (%)
1	Laki-laki	38	76%
2	Perempuan	12	24%
Jumlah		50	100%

Sumber : Sekretariat Bappeda Kabupaten Bengkulu 2009

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa jumlah pegawai laki-laki sebanyak 38 orang atau dengan jumlah persentase sebesar 76% yang terdiri dari beberapa bagian serta memiliki tugas dan fungsinya dalam merencanakan pembangunan serta penilaian atas pelaksanaannya. Sebanyak 12 orang pegawai berjenis kelamin perempuan atau dengan persentase sebesar 24% yang menduduki beberapa jabatan serta memiliki tugas dan fungsinya dalam merencanakan pembangunan serta penilaian atas pelaksanaannya. Dengan komposisi pegawai Bappeda tersebut diatas ini sangat baik dalam membantu kelancaran pelaksanaan tugas Bappeda dalam perencanaan pembangunan fisik di Kecamatan Bengkulu.

#### **4.3.2 Komposisi Pegawai Menurut Jabatan Struktural**

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Nomor 04 tahun 2005 Jabatan struktural di Bappeda Kabupaten Bengkulu terdiri dari 1 (satu) jabatan eselon II a, 1 (satu) jabatan eselon IIb, 4 eselon IIIa 8 eselon IVa dan 3 jabatan eselon III. Pada tabel berikut dapat di lihat komposisi pegawai menurut jabatan struktural di Bappeda Kabupaten Bengkulu, yaitu:

**Tabel 4.4 Komposisi Pegawai Menurut Jabatan Struktural**

No	Jabatan	Eselon	Jumlah (Orang)
1	Kepala Bappeda	II a	1
2	Sekretaris	II b	1
3	Kepala Bidang	III a/b	4
4	Kepala Sub Bidang	IV a/b	8
5	Kepala Sub Bagian	III a/b	3
6	Staf Pegawai	-	33
<b>Jumlah</b>			<b>50</b>

Sumber : Sekretariat Bappeda Kabupaten Bengkalis 2009

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa tidak semua jabatan struktural yang terisi pada Bappeda Kabupaten Bengkalis. Hal ini disebabkan masih belum terpenuhinya persyaratan untuk menduduki jabatan tersebut antara lain pangkat dan diklat struktural yang telah diikuti, sehingga ini dapat menghambat pelaksanaan tugas Bappeda dalam perencanaan pembangunan fisik di Kecamatan Bengkalis.

#### 4.3.3 Komposisi Pegawai Menurut Tingkat Pendidikan

Pendidikan bagi pegawai merupakan salah satu unsur yang terpenting dalam melaksanakan pekerjaan. Disamping itu pendidikan juga sangat berpengaruh dalam hal kenaikan pangkat dan golongan. Berikut pada tabel IV.5 dapat dilihat komposisi pegawai Bappeda Kabupaten Bengkalis menurut tingkat pendidikan.



**Tabel 4.5 Komposisi pegawai menurut tingkat pendidikan**

No.	Tingkat Pendidikan	Jumlah (Orang)	Persentase (%)
1	SLTA	9	18%
2	Diploma III	3	6%
3	Sarjana Strata 1(S1)	30	59%
4	Sarjana Strata 2 (S2)	8	18%
Jumlah		50	100%

Sumber : Sekretariat Bappeda Kabupaten Bengkalis 2009

Berdasarkan tabel di atas, dari 50 orang pegawai yang ada pada Bappeda Kabupaten Bengkalis hanya 9 orang atau 18% yang lulusan SLTA dan 3 orang Diploma. Sedangkan pegawai yang berpendidikan Sarjana S1 sebanyak 30 orang atau 59% dan pegawai yang berpendidikan Pasca Sarjana berjumlah 8 orang atau 18%. Dengan didukung Sumber Daya Manusia yang berpendidikan diharapkan Bappeda Kabupaten Bengkalis dapat melaksanakan tugas dan fungsinya dalam perencanaan pembangunan fisik di kecamatan Bengkalis khususnya dan Kabupaten Bengkalis umumnya.

#### **4.3.4 Komposisi Pegawai Menurut Kepangkatan**

Pangkat merupakan kedudukan yang menunjukkan tingkat seorang Pegawai Negeri Sipil dalam susunan kepegawaian sebagai dasar penggajian. Disamping itu untuk menduduki suatu jabatan struktural tertentu pangkat/golongan juga mempunyai peranan penting. Pada tabel berikut dapat dilihat komposisi pegawai Bappeda Kabupaten Bengkalis menurut kepangkatan.

**Tabel 4.6 Komposisi pegawai menurut kepangkatan**

<b>Nn.</b>	<b>Kepangkatan</b>	<b>Jumlah (Orang)</b>	<b>Persentase (%)</b>
1	Pembina Utama Muda (IV/c)	1	2%
2	Pembina TK I (IV/b)	2	4%
3	Pembina	2	4%
4	Penata TK I (III/d)	5	20%
5	Penata (III/c)	3	18%
6	Penata Muda TK I (III/b)	4	8%
7	Pengatur (II/c)	9	6%
8	Pengatur Muda TK I (II/b)	10	10%
<b>Jumlah</b>		<b>36</b>	<b>100</b>

Sumber : Sekretariat Bappeda Kabupaten Bengkalis 2009

Dari tabel di atas dapat dijelaskan bahwa kepangkatan di Bappeda Kabupaten Bengkalis terdiri dari pembina, kemudian pembina Tingkat II dan pembina Utama Muda, kemudian pengatur muda, pengatur, penata muda, penata dan penata tingkat I. Sementara 14 (Empat Belas) orang lagi merupakan Tenaga Honorar yang berdasarkan Peraturan Pemerintahan belum memiliki pangkat.

#### **4.3.5 Komposisi Pegawai Menurut Masa Kerja**

Masa kerja seorang pegawai cenderung mempengaruhi pengalamannya dalam melaksanakan tugas yang diberikan oleh atasan. Pada tabel berikut dapat dilihat komposisi pegawai Bappeda Kabupaten Bengkalis menurut masa kerja.

**Tabel 4.7 Komposisi pegawai menurut masa kerja**

No.	Masa Kerja	Jumlah (Orang)	Persentase (%)
1	0 – 5 Tahun	23	45%
2	5 – 10 Tahun	13	25%
3	10 – 15 Tahun	5	12%
4	15 – 20 Tahun	6	12%
5	> 20 Tahun	3	6%
Jumlah		50	100%

Sumber : Sekretariat Bappeda Kabupaten Bengkalis 2009

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa dari 50 orang pegawai yang ada pada Bappeda Kabupaten Bengkalis sebanyak 23 orang atau 45% yang memiliki masa kerja dibawah 5 tahun, dan hanya 13 orang atau 25% yang memiliki masakerja di atas 5 tahun. Untuk itu diperlukan pendidikan dan latihan agar potensi yang dimiliki pegawai tersebut dalam pelaksanaan tugas perencanaan pembangunan fisik di Kecamatan Bengkalis dapat berjalan dengan baik serta dapat ditingkatkan.

#### **4.4 Sarana dan Prasarana Bappeda Kabupaten Bengkalis**

Guna mendukung kelancaran tugas yang akan dilaksanakan oleh seluruh pegawai Bappeda Kabupaten Bengkalis sarana dan prasarana memiliki unsur pencerapan yang sangat penting dan merupakan unsur pokok yang tidak dapat ditinggalkan dan apabila ditinggalkan maka mustahil perputaran roda organisasi akan berjalan sesuai dengan harapan serta tujuan yang telah ditetapkan secara bersama-sama sebelumnya. Srana dan prasarana yang dipergunakan oleh Bappeda Kabupaten Bengkalis dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 4.8 Sarana dan Prasarana Pada Bappeda Kabupaten Bengkalis**

No.	Sarana dan Prasarana	Jumlah	Keterangan
1	Gedung Kantor	1	Baik
2	Mobil	5	Baik
3	Sepeda Motor	15	Baik
4	Komputer	26	Baik
5	Mesin Ketik	3	Baik
6	Meja Komputer	12	Baik
7	Kursi pegawai	55	Baik
8	Lemari Arsip	18	Baik
9	Meja pegawai	55	Baik
Jumlah		190	Baik

Sumber : Sekretariat Bappeda Kabupaten Bengkalis 2009

Berdasarkan tabel di atas yang penulis ambil serta dipergunakan dalam penelitian ini adalah yang masih memiliki fungsi dan dipergunakan untuk keperluan sehari-hari dalam membantu pelaksanaan tugas Bappeda dalam merencanakan pembangunan. Dengan kondisi kadan tersebut diatas sangat layak sarana dan perasarana pada Bappeda Kabupaten Bengkalis dalam membantu pelaksanaan tugas dalam merencanakan pembangunan fisik di Kabupaten Bengkalis.

#### 4.5 Visi, Misi, Tujuan, Strategis dan Kebijakan

Visi Bappeda Kabupaten Bengkalis adalah:

‘Terwujudnya perencanaan yang akurat, aspiratif, akomodatif dan partisipatif serta koordinatif untuk mencapai Bengkalis sebagai salah satu pusat perdagangan di Asia Tenggara yang didukung oleh sumber daya manusia perencana yang handal menuju masyarakat Bengkalis sejahtera pada tahun 2020’.

Misi Bappeda Kabupaten Bengkalis sesuai dengan visi yang dirumuskan adalah:

- a. Menciptakan hubungan kerja yang harmonis diantara instansi pemerintah untuk menunjang optimalisasi otonomi daerah melalui peningkatan kompetensi aparatur perencana dengan menerapkan prinsip *good governance* dan *clean governance*.
- b. Meningkatkan kualitas dan profesionalisme aparatur perencana dalam pemanfaatan perkembangan iptek yang kompetitif dan berwawasan lingkungan.
- c. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia aparatur perencana.
- d. Meningkatkan prasarana, sarana dan fasilitas perencanaan.
- e. Meningkatkan koordinasi perencanaan antar stakeholder.
- f. Mendorong pembangunan ekonomi kerakyatan dan meningkatkan peran kelembagaan dunia usaha, baik peran ke dalam Kabupaten Bengkalis maupun peran ke luar (Global).

Adapun tujuan Bappeda adalah:

- a. Menjamin adanya konsistensi perencanaan dan pemilihan program dan kegiatan prioritas daerah sesuai dengan kebutuhan daerah.
- b. Menjamin komitmen terhadap kesepakatan program dan kegiatan yang sudah dibahas secara partisipatif antar semua stakeholder pembangunan daerah, penuangannya ke dalam Rcpetada dan RAPBD.
- c. Memperkuat landasan penentuan program dan kegiatan tahunan daerah secara kronologis dan berkelanjutan.

#### **4.5.1 Strategi dan Kebijakan**

Cara mencapai tujuan dan sasaran sebagaimana yang telah diuraikan di atas dalam:

- a. Meningkatkan kemampuan sumber daya manusia perencana Kabupaten Bengkalis.
- b. Menampung permasalahan di lapangan sebagai bahan masukan perencanaan.
- c. Pengamatan lapangan dan pengumpulan data.
- d. Melakukan koordinasi dengan instansi terkait.
- e. Bekerjasama dengan tenaga ahli dari perguruan tinggi dan konsultan perencanaan.

#### **4.5.2 Struktur organisasi**

Struktur organisasi merupakan kerangka kerja yang menggambarkan hubungan dan batasan yang jelas dalam wewenang dan tanggung jawab dari setiap

bagian yang ada dalam organisasi. Dengan adanya struktur organisasi ini akan memudahkan dalam pencapaian tujuan secara efektif dan efisien.

Adapun tugas pokok dan fungsi organisasi dan tata kerja Bappeda Kabupaten Bengkalis adalah sebagai berikut:

#### 1. Kepala

Kepala Bappeda mempunyai tugas:

- a. Memimpin dalam pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana kepala Bappeda
- b. Memimpin dan membina bawahannya dalam rangka pelaksanaan tugas dan pencapaian tujuan organisasi
- c. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala Daerah sesuai dengan bidang tugasnya

#### 2. Bagian tata usaha

Bagian tata usaha mempunyai tugas melakukan urusan perencanaan, surat-menyurat, kepegawaian, keuangan, rumah tangga, perlengkapan dan umum. Untuk menyelenggarakan tugas-tugas tersebut bagian tata usaha mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan rencana program, monitoring, evaluasi dan pelaporan
- b. Pelaksanaan urusan surat-menyurat, kearsipan, pengadaan serta hubungan masyarakat
- c. Pengelolaan administrasi kepegawaian, perlengkapan dan rumah tangga
- d. Pengelolaan administrasi keuangan
- e. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan atasan

### 3. Bidang ekonomi

Bidang ekonomi mempunyai tugas menyusun perencanaan dan mengkoordinasikan pelaksanaan pembangunan yang meliputi kewenangan di bidang industri, perdagangan, koperasi usaha kecil dan menengah, dunia usaha, pertambangan dan energi serta pertanian secara umum.

Untuk menyelenggarakan tugas-tugas tersebut, bidang ekonomi mempunyai fungsi:

- a. Melaksanakan perencanaan teknis di bidang ekonomi sesuai dengan kewenangan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku
- b. Melaksanakan pengkoordinasian terhadap lembaga perangkat daerah sesuai dengan lingkup biddangnya dalam merencanakan dan pelaksanaan pembangunan
- c. Melakukan survey sebelum menetapkan pelaksanaan pembangunan
- d. Menginventarisasi permasalahan-permasalahan dari pelaksanaan pembangunan dalam rangka mengoptimalkan koordinasi penyusunan pedoman selanjutnya
- e. Mengevaluasi hasil pembangunan yang telah dilaksanakan
- f. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan

### 4. Bidang fisik dan prasarana

Bidang fisik dan prasarana mempunyai tugas menyusun perencanaan dan mengkoordinasikan pelaksanaan pembangunan yang meliputi kewenangan di bidang fisik dan prasaran perumahan, pariwisata, lingkungan hidup dan tata ruang.

Untuk menyelenggarakan tugas-tugas tersebut, bidang fisik dan prasaran mempunyai fungsi:



- a. Melaksanakan perencanaan teknis di bidang fisik dan prasarana sesuai dengan kewenangan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku
  - b. Melaksanakan pengkoordinasian terhadap lembaga perangkat daerah sesuai dengan lingkup bidangnya dalam merencanakan dan pelaksanaan pembangunan
  - c. Melakukan survey bersama satuan organisasi terkait dalam upaya penetapan kelayakan pembangunan yang akan dilaksanakan
  - d. Menginventarisasi permasalahan-permasalahan dari pelaksanaan pembangunan dalam rangka mengoptimalkan koordinasi penyusunan pedoman selanjutnya
  - e. Mengevaluasi hasil pembangunan yang telah dilaksanakan sebagai upaya penetapan pedoman perencanaan pembangunan selanjutnya
  - f. Melaksanakan tugas-tugas yang diberikan oleh atasan
5. Bidang sosial dan budaya

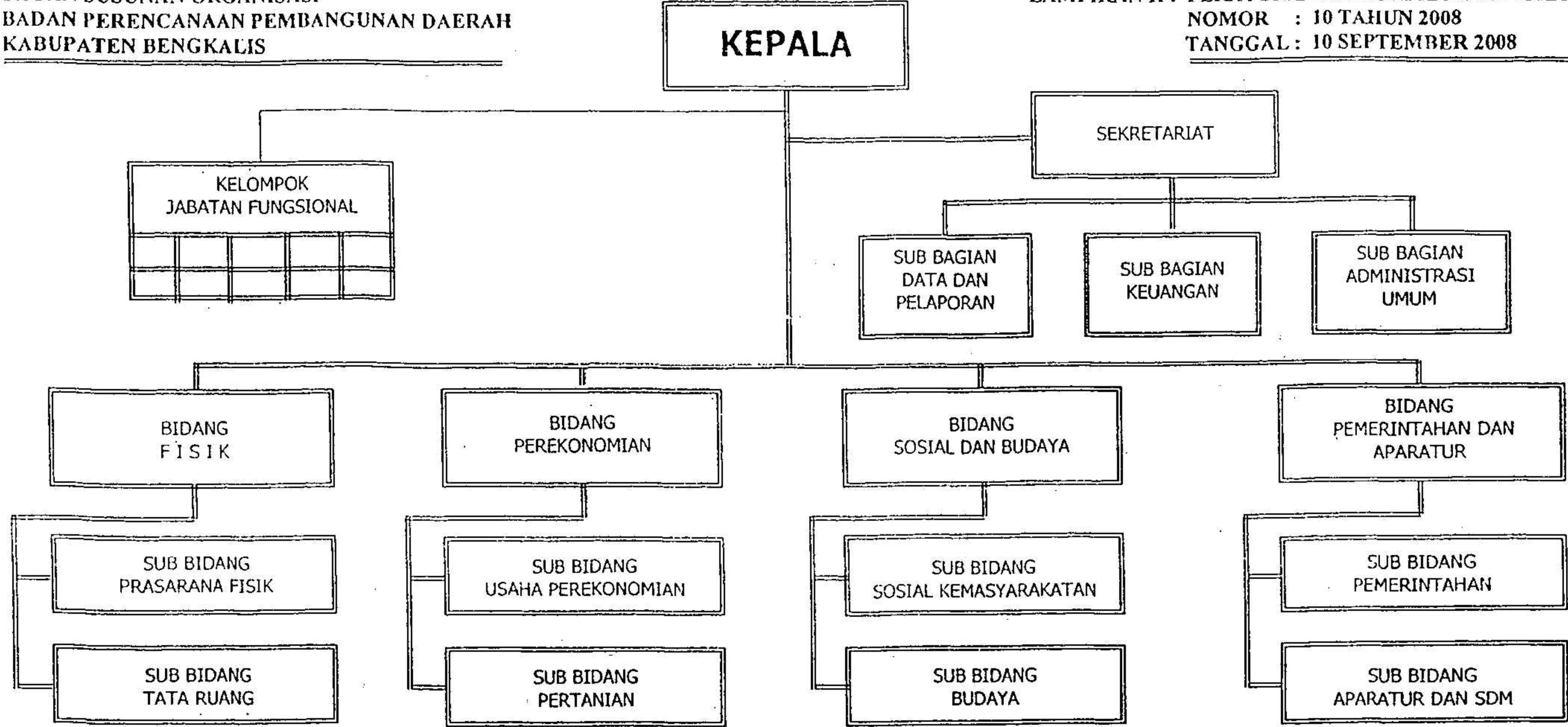
Bidang sosial dan budaya mempunyai tugas menyusun perencanaan dan mengkoordinasikan pelaksanaan pembangunan yang meliputi kewenangan di bidang peningkatan sumber daya manusia, pembinaan aparatur dan pengawasan, penyelenggaraan pendidikan dan latihan, hukum, politik, penerangan, komunikasi dan media massa, pemukiman dan pengembangan wilayah, keprasaranaan umum, kependudukan, kesehatan, keschatan, kesejahteraan sosial, keagamaan serta ilmu pengetahuan dan teknologi.

Untuk menyelenggarakan tugas-tugas tersebut, bidang sosial dan budaya mempunyai fungsi:

- a. Melaksanakan perencanaan teknis di bidang sosial dan budaya sesuai dengan kewenangan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku

**BAGAN SUSUNAN ORGANISASI  
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH  
KABUPATEN BENGKALIS**

**LAMPIRAN II : PERATURAN DAERAH KAB. BENGKALIS  
NOMOR : 10 TAHUN 2008  
TANGGAL : 10 SEPTEMBER 2008**



**BUPATI BENGKALIS**

ttd.

**H. SYAMSURIZAL**

## BAB V

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### 5.1. Identititas Responden

Sebelum penulis menjelaskan secara terperinci hasil penelitian yang berkaitan dengan hal tersebut di atas, ada baiknya terlebih dahulu melihat gambaran umum atau karakteristik responden sebagai berikut.

##### 5.1.1 Responden Menurut Jenis Kelamin

Pada permulaan penelitian ini akan terlihat jenis kelamin responden dimana hal ini di jelaskan pada tabel V.1 berikut:

Tabel 5.1 Komposisi Responden Menurut Jenis Kelamin			
No	Jenis Kelamin	Jumlah	Persentase (%)
1	Laki-laki	39	76%
2	Perempuan	12	24%
Jumlah		51	100%

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa jumlah pegawai laki-laki sebanyak 39 orang atau dengan jumlah persentase sebesar 76% yang terdiri dari beberapa bagian serta memiliki tugas dan fungsinya dalam merencanakan pembangunan serta penilaian atas pelaksanaannya. Sebanyak 12 orang pegawai berjenis kelamin perempuan atau dengan persentase sebesar 24%.

##### 5.1.2 Responden Menurut Golongan Umur

Secara teoritis faktor umur seseorang mempunyai hubungan dan keterkaitan yang kuat dengan kemampuan seseorang dalam melakukan aktivitas

pekerjaan sehari-hari. Gambaran mengenai golongan umur yang diambil dari hasil penelitian terhadap orang/ pegawai antara lain sebagai berikut:

**Tabel 5.2 Komposisi Responden Menurut Golongan Umur**

No	Golongan Umur	Jumlah	Persentase (%)
1	20 – 30 Tahun	5	6,17
2	30 – 40 Tahun	20	45,67
3	40 - Keatas	26	44,44
<b>Jumlah</b>		<b>51</b>	<b>100</b>

Dari tabel V.2 dapat disimpulkan bahwa pegawai dengan melibatkan komposisi umumnya, diketahui golongan umur antara 20 sampai dengan 30 Tahun yaitu sebanyak 5 orang atau 6,17%, golongan umur 30 sampai dengan 40 Tahun yaitu sebanyak 20 orang atau 45,67% dan golongan umur antara 40 Tahun keatas sebanyak 26 orang atau 44,44%. Dari hasil ini, bisa kita simpulkan bahwa faktor umur sangat mempengaruhi kinerja & efektivitas dari seorang pegawai dalam melaksanakan tugas yang diembannya.

### 5.1.3 Responden Menurut Tingkat Pendidikan

Pendidikan bagi pegawai merupakan salah satu unsur yang terpenting dalam melaksanakan pekerjaan. Disamping itu pendidikan juga sangat berpengaruh dalam hal kenaikan pangkat dan golongan. Berikut pada tabel V.3 dapat dilihat komposisi pegawai Bappeda Kabupaten Bengkalis menurut tingkat pendidikan.

**Tabel 5.3 Komposisi responden menurut tingkat pendidikan**

No.	Tingkat Pendidikan	Jumlah (Orang)	Persentase (%)
1	SLTA	9	18%
2	Diploma III	3	6%
3	Sarjana Strata I (S1)	30	59%
4	Sarjana Strata 2 (S2)	9	18%
Jumlah		51	100%

Berdasarkan tabel di atas, dari 51 orang pegawai yang menjadi responden hanya 9 orang atau 18% yang lulusan SLTA dan 3 orang Diploma. Sedangkan pegawai yang berpendidikan Sarjana S1 sebanyak 30 orang atau 59% dan pegawai yang berpendidikan Pasca Sarjana berjumlah 9 orang atau 18%. Dengan didukung Sumber Daya Manusia yang berpendidikan diharapkan Bappeda Kabupaten Bengkalis dapat melaksanakan tugas dan fungsinya dalam perencanaan pembangunan fisik di kecamatan Bengkalis khususnya dan Kabupaten Bengkalis umumnya.

#### 5.1.4 Responden Menurut Masa Kerja

Masa kerja seorang pegawai cenderung mempengaruhi pengalamannya dalam melaksanakan tugas yang diberikan oleh atasan. Pada tabel berikut dapat dilihat komposisi pegawai Bappeda Kabupaten Bengkalis menurut masa kerja.

**Tabel 5.4 Komposisi responden menurut masa kerja**

No.	Masa Kerja	Jumlah (Orang)	Persentase (%)
1	0 – 5 Tahun	23	45%
2	5 – 10 Tahun	13	25%
3	10 – 15 Tahun	6	12%
4	15 – 20 Tahun	6	12%
5	> 20 Tahun	3	6%
Jumlah		51	100%

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa dari 51 orang pegawai yang menjadi responden dalam penelitian ini sebanyak 23 orang atau 45% yang memiliki masa kerja dibawah 5 tahun, dan hanya 13 orang atau 25% yang memiliki masakerja di atas 5 tahun. Untuk itu diperlukan pendidikan dan latihan agar potensi yang dimiliki pegawai tersebut dalam pelaksanaan tugas perencanaan pembangunan fisik di Kabupaten Bengkalis dapat berjalan dengan baik serta dapat ditingkatkan.

## **5.2 Analisis Pelaksanaan Tugas Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Bengkalis dalam Perencanaan Pembangunan Fisik di Kecamatan Bengkalis**

### **5.2.1 Tanggapan Responden Mengenai Pelaksanaan Tugas Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Ditinjau Dari Aspek Tugas dalam Perencanaan**

Untuk mengetahui Tanggapan Responden Mengenai Pelaksanaan Tugas Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) dalam Perencanaan Pembangunan Fisik di Kecamatan Bengkalis Ditinjau Dari Aspek Tugas dalam perencanaan, dapat diketahui dari dari hasil tabulasi tanggapan responden. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dari tabel berikut ini:

**Tabel. 5.5 Tanggapan Responden Mengenai Kemampuan untuk pencapaian tujuan**

No	Kriteria	Jumlah	%
1	BAIK	21	41%
2	CUKUP	26	51%
3	KURANG BAIK	4	8%
	JUMLAH	51	100%

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa pada item “Pembangunan dilaksanakan berdasarkan kemampuan untuk mencapai tujuan” didapatkan

jawaban baik sebesar 41%, jawaban cukup sebesar 51% dan jawaban kurang baik sebesar 8%. Berdasarkan penilaian diatas, disimpulkan bahwa kemampuan staf Bappeda untuk mencapai tujuan pembangunan sebagai implementasi dari pelaksanaan tugas bisa dikatakan baik. Dengan begitu, penilaian ini dapat dijadikan dasar bagi perencanaan pembangunan bahwa kemampuan untuk merencanakan program pembangunan dibutuhkan dalam mencapai tujuan pembangunan.

**Tabel. 5.6      Tanggapan Responden Mengenai Kemampuan dalam merincikan**

No	Kriteria	Jumlah	%
1	BAIK	23	45%
2	CUKUP	22	43%
3	KURANG BAIK	6	12%
	JUMLAH	51	100%

Sedangkan pada item “Perencanaan dilaksanakan berdasarkan kemampuan untuk merincikan segala keperluan pembangunan” diketahui jawaban baik sebesar 45%, jawaban cukup sebesar 43% dan jawaban kurang baik sebesar 12%. Berdasarkan hasil penilaian tersebut, menunjukkan kepada kita bahwa kemampuan dalam merincikan segala keperluan untuk pembangunan telah dilaksanakan dengan baik oleh staf Bappeda. Merincikan segala keperluan (baik itu keperluan material, penempatan/ lokasi, biaya) diperlukan dalam proses pembangunan terutama dalam perencanaan pembangunan fisik untuk setiap daerah yang akan memulai pembangunan tersebut. Karena perincian yang tepat akan menghasilkan pembangunan yang tepat guna serta berdaya guna, tentunya bagi masyarakat yang menjadi tujuan dari dilakukannya pembangunan.



**Tabel. 5.7      Tanggapan Responden Mengenai Dapat dijadikan sebagai ramalan**

No	Kriteria	Jumlah	%
1	BAIK	25	49%
2	CUKUP	21	41%
3	KURANG BAIK	5	10%
	JUMLAH	51	100%

Selanjutnya, pada item “Perencanaan pembangunan dijadikan sebagai peramalan kedepannya untuk kemajuan” didapatkan jawaban baik sebesar 25%, jawaban cukup sebesar 41% dan jawaban kurang baik sebesar 10%. Melihat hasil penilaian ini, peneliti mendapati pernyataan dari 5 responden yang beranggapan tidak diperlukannya perencanaan pembangunan sebagai peramalan untuk pembangunan di masa yang akan datang dengan alasan bahwa ramalan akan terlihat bila proyek fisik baik yang berskala besar maupun kecil telah terlaksana dan dalam pelaksanaannya ditemui hambatan-hambatan. Dari hambatan itulah akan dipersiapkan langkah-langkah (ramalan) agar untuk proyek ke depannya hambatan tersebut bisa dihindari.

Keseluruhan penilaian diatas sejalan dengan hasil wawancara yang peneliti lakukan dengan Kasubag. Administrasi Umum (Ibu Syamsidar, SH), sebagai berikut:

“Pada dasarnya tugas perencanaan pembangunan sudah dilaksanakan dan sesuai dengan aturan yang merujuk pada Surat Edaran Bersama (SEB) dari Kepala Bappenas dan Menteri Dalam Negeri mengenai Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang). Namun, kita masih melihat adanya kendala-kendala di setiap bidang (SKPD) yang ikut serta dalam proses perencanaan pembangunan. Kendala tersebut bisa berupa kurangnya ketersediaan data maupun SDM yang belum memadai. Selanjutnya untuk masa yang akan datang diharapkan kendala-kendala tersebut bisa diatasi dan kita bisa bekerja dengan lebih optimal agar pembangunan untuk Kabupaten Bengkalis bisa terlaksana dengan baik. (Wawancara, 25 Februari 2010)



Hal ini juga sejalan dengan pernyataan Camat Bengkalis yaitu Bapak Drs. Ja'far Arif, beliau mengatakan :

“Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menyusun dokumen Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sebagai landasan penyusunan RAPBN/RAPBD setiap tahunnya. Penyusunan rancangan RKPD dilakukan melalui proses pembahasan yang terkoordinasi antara Bappeda dengan seluruh satuan kerja perangkat daerah (SKPD) melalui penyelenggaraan Musrenbang di Daerah masing-masing. Proses ini telah berjalan dengan baik walaupun masih terdapat kendala-kendala di setiap pelaksanaannya. Kendala tersebut bisa berupa kondisi dokumen penunjang yang tidak lengkap atau keterbatasan narasumber. Namun kita berusaha bekerja secara optimal dalam memberikan masukan kegiatan prioritas serta menyepakati rencana kegiatan lintas desa/kelurahan di kecamatan yang bersangkutan sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Kecamatan dan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten/kota pada tahun berikutnya.” (Wawancara, 27 Februari 2010)

Untuk mengetahui klasifikasi penilaian dari data di atas dapat diperhatikan pada tabel di bawah ini.

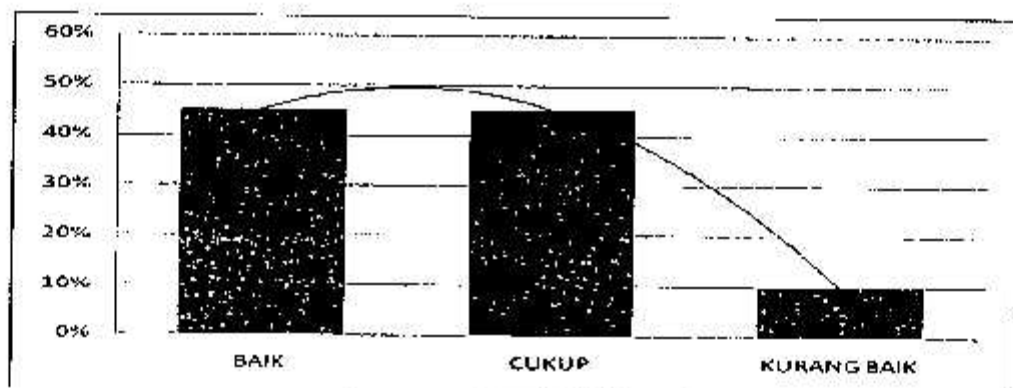
**Tabel. 5.8 Klasifikasi Tanggapan Responden Mengenai Pelaksanaan Tugas Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Ditinjau Dari Aspek Tugas dalam Perencanaan**

No	Kriteria	Jumlah	%
1	BAIK	69	45%
2	CUKUP	69	45%
3	KURANG BAIK	15	10%
	JUMLAH	153	100%

Secara lebih mendetail dapat diketahui bahwa pada indikator tugas dalam perencanaan didapatkan data bahwa Pelaksanaan Tugas Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) dalam Perencanaan Pembangunan Fisik di Kecamatan Bengkalis dikatakan baik oleh sebanyak 69 orang atau dengan persentase sebesar 45%. Kemudian yang menyatakan cukup baik ada sebanyak 69 orang dengan persentase sebesar 45%. Dan yang menyatakan kurang baik adalah

10%. Dengan demikian bisa ditarik kesimpulan bahwa pelaksanaan tugas Bappeda ditinjau dari aspek tugas dalam perencanaan telah berjalan dengan baik.

Dapat juga diperhatikan pada grafik batang tentang Tanggapan Responden Mengenai Pelaksanaan Tugas Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) dalam Perencanaan Pembangunan Fisik di Kecamatan Bengkalis Ditinjau Dari Aspek Tugas dalam perencanaan di bawah ini.



Grafik 1.

Tanggapan Responden Mengenai Pelaksanaan Tugas Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Ditinjau Dari Aspek Tugas dalam Perencanaan

Dari data di atas dapat diketahui bahwa responden menyetujui jika tugas dalam perencanaan dapat mendukung Pelaksanaan Tugas Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) dalam Perencanaan Pembangunan Fisik di Kecamatan Bengkalis. Dimana yang menyatakan ya lebih dominan dibandingkan yang menyatakan tidak. Ini membuktikan bahwa Pelaksanaan Tugas Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) dalam Perencanaan Pembangunan Fisik di Kecamatan Bengkalis banyak ditentukan oleh tugas dalam perencanaan.

### 5.2.2 Tanggapan Responden Mengenai Pelaksanaan Tugas Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Ditinjau Dari Aspek Tugas dalam Pengumpulan Data

Untuk mengetahui Tanggapan Responden Mengenai Pelaksanaan Tugas Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) dalam Perencanaan Pembangunan Fisik di Kecamatan Bengkalis Ditinjau Dari Aspek Tugas dalam Pengumpulan Data, dapat diketahui dari hasil tabulasi tanggapan responden. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dari tabel berikut ini:

**Tabel. 5.9      Tanggapan Responden Mengenai Kemampuan dalam pengolahan data**

No	Kriteria	Jumlah	%
1	BAIK	24	47%
2	CUKUP	21	41%
3	KURANG BAIK	6	12%
	JUMLAH	51	100%

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa pada item “Pelaksanaan tugas dalam perencanaan pembangunan disesuaikan dengan kemampuan dalam pengolahan data” didapatkan jawaban baik sebesar 47%, jawaban cukup sebesar 41% dan jawaban kurang baik sebesar 12%. Dari hasil ini bisa kita tarik kesimpulan bahwa staf Bappeda telah mampu menjalankan tugasnya dalam hal pengolahan data. Ini juga memberikan pemahaman kepada kita bahwa pengolahan data sangat diperlukan agar proses perencanaan tidak terhambat. Karena data dibutuhkan sebagai acuan untuk pembangunan kedepannya.

**Tabel. 5.10    Tanggapan Responden Mengenai Dapat dijadikan sebagai bahan acuan**

No	Kriteria	Jumlah	%
1	BAIK	22	43%
2	CUKUP	23	45%
3	KURANG BAIK	6	12%
	JUMLAH	51	100%

Kemudian pada item “Data yang dipersiapkan dijadikan acuan bahan pembangunan” diketahui jawaban baik sebesar 43%, jawaban cukup sebesar 45% dan jawaban kurang baik sebesar 12%. Dari jawaban tersebut disimpulkan bahwa yang menjadi acuan maupun pertimbangan pembangunan tidak hanya pada data melainkan bagaimana proses penyusunan anggaran setiap tahunnya sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh masyarakat. Secara keseluruhan, baik data maupun penyesuaian kebutuhan sangatlah penting bagi perencanaan dan proses pembangunan sekarang maupun yang akan datang.

**Tabel. 5.11    Tanggapan Responden Mengenai Kemampuan untuk diterima dalam membuat rencana pembangunan**

No	Kriteria	Jumlah	%
1	BAIK	26	51%
2	CUKUP	18	35%
3	KURANG BAIK	7	14%
	JUMLAH	51	100%

Selanjutnya pada item “Pelaksanaan tugas pengumpulan data dijadikan rencana pembangunan yang lebih baik” didapatkan jawaban baik sebesar 51%, jawaban cukup sebesar 35% dan jawaban kurang baik sebesar 14%. Hal ini jelas menyatakan bahwa data yang tersedia, baik itu data laporan kegiatan yang lalu maupun data kebutuhan yang diperlukan untuk kedepannya diperlukan sebagai tolak ukur pada proses perencanaan pembangunan.

Hal ini sejalan dengan wawancara yang peneliti lakukan dengan Kasubag.

Data dan Laporan, (Bapak Dasril, S.Sos, M.AP), sebagai berikut:

“Dalam proses pembangunan, data penunjang merupakan sarana pendukung yang sangat dibutuhkan bagi kelancaran pembangunan itu sendiri. Sementara untuk pembangunan fisik, data mengenai lokasi, keadaan tanah, keadaan lokasi, kemudahan pengantaran material, banyak pekerja yang dibutuhkan, anggaran dana yang diperlukan dan lain sebagainya sangat berpengaruh besar karena data-data tersebut merupakan unsur penentu kelancaran sebuah proyek fisik. Kemudian untuk proyek dengan skala besar, yang membutuhkan waktu pengerjaan sampai bertahun-tahun perlu dilakukan riset, riset geologi, iklim, cuaca, jenis tanah, keadaan flora dan fauna, dan lain sebagainya. Selanjutnya, dalam proses pengumpulan data tersebut kita menggunakan tenaga ahli yang berkompeten yang sengaja kita datangkan agar proyek-proyek yang akan dilaksanakan berjalan sesuai dengan apa yang telah kita rencanakan.” (Wawancara, 20 Februari 2010)

Untuk mengetahui klasifikasi penilaian dari data di atas dapat diperhatikan pada tabel di bawah ini.

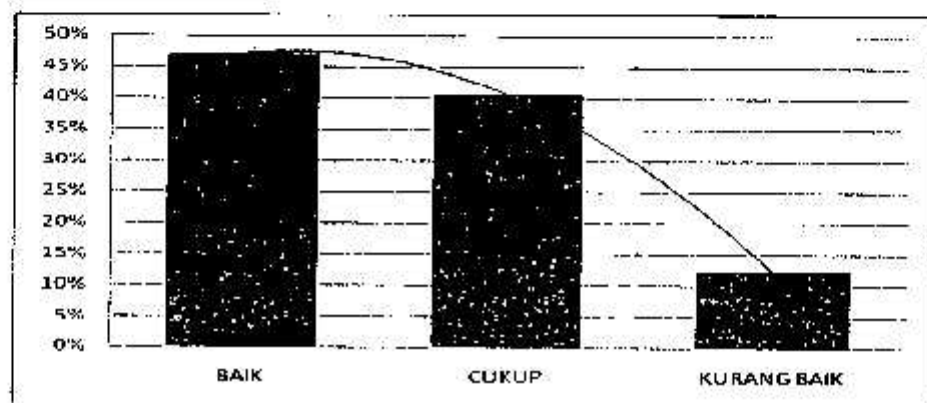
**Tabel 5.12 Klasifikasi Tanggapan Responden Mengenai Pelaksanaan Tugas Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Ditinjau Dari Aspek Tugas dalam Pengumpulan Data**

No	Kriteria	Jumlah	%
1	BAIK	72	47%
2	CUKUP	62	41%
3	KURANG BAIK	19	12%
	JUMLAH	153	100%

Secara lebih mendetail dapat diketahui bahwa pada indikator tugas dalam perencanaan didapatkan data bahwa Pelaksanaan Tugas Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) dalam Perencanaan Pembangunan Fisik di Kecamatan Bengkalis dikatakan baik oleh sebanyak 72 orang atau dengan persentase sebesar 47%. Kemudian yang menyatakan cukup baik ada sebanyak 62

orang dengan persentase sebesar 41%. Dan yang menyatakan kurang baik adalah 12%.

Dapat juga diperhatikan pada grafik batang tentang Tanggapan Responden Mengenai Pelaksanaan Tugas Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) dalam Perencanaan Pembangunan Fisik di Kecamatan Bengkalis Ditinjau Dari Aspek Tugas dalam perencanaan di bawah ini.



Grafik 1.  
Tanggapan Responden Mengenai Pelaksanaan Tugas Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Ditinjau Dari Aspek Tugas dalam Pengumpulan Data

Dari data di atas dapat diketahui bahwa responden menyetujui jika tugas dalam perencanaan dapat mendukung Pelaksanaan Tugas Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) dalam Perencanaan Pembangunan Fisik di Kecamatan Bengkalis. Dimana yang menyatakan baik lebih dominan dibandingkan yang menyatakan cukup dan kurang baik. Ini membuktikan bahwa Pelaksanaan Tugas Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) dalam Perencanaan Pembangunan Fisik di Kecamatan Bengkalis banyak ditentukan oleh tugas dalam perencanaan.

### 5.2.3 Tanggapan Responden Mengenai Pelaksanaan Tugas Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Ditinjau Dari Aspek Tugas dalam Pelaksanaan Pembangunan

Untuk mengetahui Tanggapan Responden Mengenai Pelaksanaan Tugas Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) dalam Perencanaan Pembangunan Fisik di Kecamatan Bengkalis Ditinjau Dari Aspek Tugas dalam Pelaksanaan Pembangunan, dapat diketahui dari hasil tabulasi tanggapan responden. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dari tabel berikut ini:

**Tabel. 5.13 Tanggapan Responden Mengenai Kemampuan dalam merencanakan**

No	Kriteria	Jumlah	%
1	BAIK	29	57%
2	CUKUP	16	31%
3	KURANG BAIK	6	12%
	JUMLAH	51	100%

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa pada item “Pelaksanaan perencanaan pembangunan dipegang oleh staf yang mampu membuat perencanaan pembangunan” didapatkan jawaban baik sebesar 57%, jawaban cukup sebesar 31% dan jawaban kurang baik sebesar 12%. Hal ini menandakan bahwa staf Bappeda memiliki kemampuan yang baik dalam perencanaan sebagai dasar pelaksanaan pembangunan. Tentunya pada proses ini yang memiliki kompeten dalam perencanaan pembangunan haruslah diikutsertakan dalam proses perencanaan pembangunan. Dengan begitu bisa meningkatkan kualitas dan kematangan dalam perencanaan maupun pelaksanaan pembangunan.

**Tabel. 5.14 Tanggapan Responden Mengenai Mempunyai kewenangan melaksanakan**

No	Kriteria	Jumlah	%
1	BAIK	22	43%
2	CUKUP	21	41%
3	KURANG BAIK	8	16%
	JUMLAH	51	100%

Sementara pada item “Pelaksanaan perencanaan pembangunan dilaksanakan oleh staf yang punya kewenangan dalam pembangunan” diketahui jawaban baik sebesar 43%, jawaban cukup sebesar 41% dan jawaban kurang baik sebesar 16%. Dari hasil penilaian ini, dapat kita jelaskan bahwa staf yang berwenang dalam pelaksanaan pembangunan mempunyai andil besar dalam terwujudnya tujuan pembangunan.

**Tabel. 5.15 Tanggapan Responden Mengenai Kemampuan untuk menyelesaikan pekerjaan tepat waktu**

No	Kriteria	Jumlah	%
1	BAIK	21	41%
2	CUKUP	26	51%
3	KURANG BAIK	4	8%
	JUMLAH	51	100%

Selanjutnya pada item “Pelaksanaan perencanaan pembangunan dilaksanakan oleh staf yang sanggup menyelesaikan pekerjaan tepat waktu” didapatkan jawaban baik sebesar 41%, jawaban cukup sebesar 51% dan jawaban kurang baik sebesar 8%.

Hal ini sejalan dengan wawancara yang peneliti lakukan dengan Kabid Fisik (Bapak Ryo Gunawan, ST), sebagai berikut:

“Dilaksanakannya pembangunan baik fisik maupun non-fisik adalah untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat secara merata dan berkesinambungan. Namun dalam implementasi nya kami akui bahwa belum sepenuhnya tugas tersebut terlaksana dengan baik. Terutama untuk pembangunan di sektor fisik, yang mana pembangunan fisik



tersebut membutuhkan banyak sekali biaya dan sumber daya, baik sumber daya alam dan sumber daya manusia. Akibat kekurangan ini juga ada beberapa proyek yang kita lihat terbengkalai dan harus menunggu tender untuk tahun berikutnya agar proyek tersebut bisa rampung.” (Wawancara, 26 Februari 2010)

Dalam hal ini juga sejalan dengan pernyataan Sekretaris Camat Kecamatan Bengkalis yaitu Bapak Yusrizal, S.Sos, sebagai berikut :

“Berbicara tentang pelaksanaan pembangunan, hal ini tidak terlepas dari tanggung jawab dan peran semua pihak, baik Bappeda yang mewakili kepala daerah sebagai badan perencana, seluruh SKPD sebagai pelaksana maupun masyarakat yang nantinya akan menikmati hasil dari pembangunan itu sendiri. Pembangunan fisik yang dilakukan di Kecamatan Bengkalis hingga saat ini masih berjalan sebagaimana mestinya. Diantaranya pembangunan sekolah-sekolah, mesjid, jalan, pembangunan drainase, rumah sakit dan sebagainya. Dalam hal ini kami di tingkat kecamatan juga akan terus memantau pelaksanaan yang dilaksanakan di setiap daerah (desa/ Kelurahan) yang masuk dalam wilayah Kecamatan Bengkalis agar pembangunan yang dijalankan benar-benar merata dan menyentuh masyarakat.” (Wawancara, 26 Februari 2010)

Untuk mengetahui klasifikasi penilaian dari data di atas dapat diperhatikan pada tabel di bawah ini.

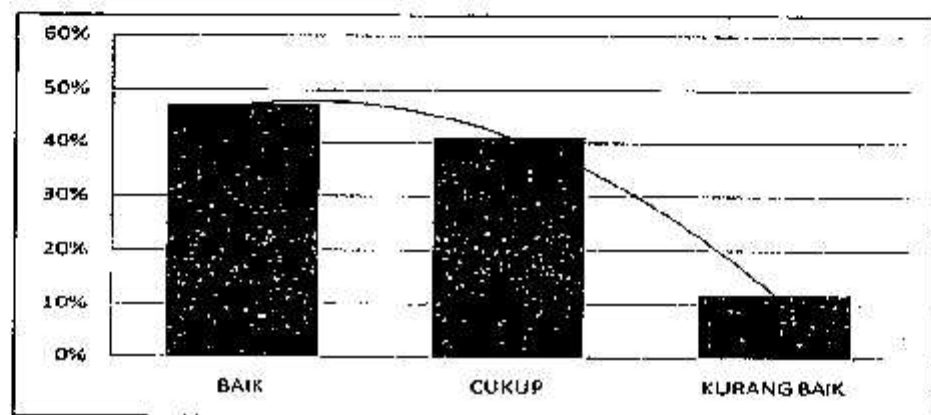
**Tabel. 5.16 Klasifikasi Tanggapan Responden Mengenai Pelaksanaan Tugas Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Ditinjau Dari Aspek Tugas dalam Pelaksanaan Pembangunan**

No	Kriteria	Jumlah	%
1	BAIK	72	47%
2	CUKUP	63	41%
3	KURANG BAIK	18	12%
	JUMLAH	153	100%

Secara lebih mendetail dapat diketahui bahwa pada indikator tugas dalam perencanaan didapatkan data bahwa Pelaksanaan Tugas Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) dalam Perencanaan Pembangunan Fisik di Kecamatan Bengkalis dikatakan baik oleh sebanyak 72 orang atau

dengan persentase sebesar 47%. Kemudian yang menyatakan cukup baik ada sebanyak 63 orang dengan persentase sebesar 41%. Dan yang menyatakan kurang baik adalah 12%.

Dapat juga diperhatikan pada grafik batang tentang Tanggapan Responden Mengenai Pelaksanaan Tugas Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) dalam Perencanaan Pembangunan Fisik di Kecamatan Bengkalis Ditinjau Dari Aspek Tugas dalam perencanaan di bawah ini.



Grafik 1.

**Tanggapan Responden Mengenai Pelaksanaan Tugas Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Ditinjau Dari Aspek Tugas dalam Pelaksanaan Pembangunan**

Dari data di atas dapat diketahui bahwa responden menyetujui jika tugas dalam perencanaan dapat mendukung Pelaksanaan Tugas Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) dalam Perencanaan Pembangunan Fisik di Kecamatan Bengkalis. Dimana yang menyatakan ya lebih dominan dibandingkan yang menyatakan tidak. Ini membuktikan bahwa Pelaksanaan Tugas Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) dalam Perencanaan Pembangunan Fisik di Kecamatan Bengkalis banyak ditentukan oleh tugas dalam perencanaan.

#### 5.2.4 Tanggapan Responden Mengenai Pelaksanaan Tugas Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Ditinjau Dari Aspek Tugas dalam Penilaian

Untuk mengetahui Tanggapan Responden Mengenai Pelaksanaan Tugas Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) dalam Perencanaan Pembangunan Fisik di Kecamatan Bengkalis Ditinjau Dari Aspek Tugas dalam Penilaian, dapat diketahui dari hasil tabulasi tanggapan responden. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dari tabel berikut ini:

**Tabel. 5.17 Tanggapan Responden Mengenai Kemampuan untuk mengevaluasi**

No	Kriteria	Jumlah	%
1	BAIK	22	43%
2	CUKUP	26	51%
3	KURANG BAIK	3	6%
	JUMLAH	51	100%

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa pada item “Pelaksanaan perencanaan pembangunan dilaksanakan oleh staf yang kompeten dalam membuat evaluasi pembangunan” didapatkan jawaban baik sebesar 43%, jawaban cukup sebesar 51% dan jawaban kurang baik sebesar 6%. Melihat dari data diatas, menunjukkan bahwa evaluasi terhadap pembangunan yang dilakukan oleh Bappeda telah berjalan dengan baik. Evaluasi pembangunan haruslah dilakukan oleh staf yang memiliki kemampuan (berkompeten) dibidangnya agar hambatan-hambatan yang terjadi pada proses perencanaan maupun pelaksanaan pembangunan bisa di minimalisir.

**Tabel. 5.18    Tanggapan Responden Mengenai Mempunyai kewenangan dalam monitoring pekerjaan**

No	Kriteria	Jumlah	%
1	BAIK	13	25%
2	CUKUP	30	59%
3	KURANG BAIK	8	16%
	JUMLAH	51	100%

Selanjutnya pada item “Pelaksanaan perencanaan pembangunan diawasi betul-betul oleh staf pengawas proyek” diketahui jawaban baik sebesar 25%, jawaban cukup sebesar 59% dan jawaban kurang baik sebesar 16%. Dari hasil penilaian ini, didapati bahwa tugas Bappeda dalam memonitoring suatu pekerjaan cukup baik. Namun, monitoring terhadap pembangunan seharusnya tidak hanya diawasi oleh pengawas proyek melainkan juga harus diawasi oleh setiap lapisan masyarakat, baik itu dari tingkat desa/ kelurahan, kecamatan maupun SKPD yang menaungi proyek tersebut.

**Tabel. 5.19    Tanggapan Responden Mengenai Memiliki kemampuan untuk berkoordinasi**

No	Kriteria	Jumlah	%
1	BAIK	26	51%
2	CUKUP	21	41%
3	KURANG BAIK	4	8%
	JUMLAH	51	100%

Sementara itu pada item “Staf yang berwenang memiliki kemampuan dan skill berkoordinasi dengan unsur-unsur yang terkait dengan pelaksanaan pembangunan” didapatkan jawaban baik sebesar 51%, jawaban cukup sebesar 41% dan jawaban kurang baik sebesar 8%. Agar pembangunan tersebut berjalan sesuai dengan apa yang telah direncanakan, sangat diperlukannya koordinasi antara Pemerintah Daerah yang dalam hal ini adalah Bappeda, Satuan Kerja Perangkat Daerah maupun Kontraktor yang mengemban proyek tersebut. Dari

hasil penilaian ini jelas menegaskan bahwa koordinasi yang dilakukan oleh ketiga unsur diatas telah berjalan optimal.

Hal ini sejalan dengan wawancara yang peneliti lakukan dengan Kabid Fisik (Bapak Ryo Gunawan, ST), sebagai berikut:

“Secara umum, setiap pembangunan baik fisik maupun non-fisik pasti memerlukan penilaian. Hal ini dimaksudkan agar kedepannya bisa dijadikan tolok ukur untuk lebih berkembang dan lebih optimal. Pada dasarnya yang melaksanakan penilaian adalah staf pengawas. Namun tidak tertutup kemungkinan peran masyarakat melalui perangkat desa/ kelurahan maupun kecamatan sangat dibutuhkan sebagai pembanding dalam proses penilaian. Sementara itu, dari segi keuangan biasanya diperiksa oleh dewan pemeriksa atau auditor, dalam hal ini adalah Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan lembaga/ badan yang berwenang lainnya. Tentunya koordinasi dalam pelaksanaan sebuah proyek sangat diperlukan, hal ini agar tidak terjadi simpang siur terhadap pembangunan itu sendiri. Tapi kami berusaha melaksanakan pengawasan semaksimal mungkin, terutama bagi kontraktor atau developer yang bermain dan berbuat curang (menyalahi prosedur).” (Wawancara, 26 Februari 2010)

Untuk mengetahui klasifikasi penilaian dari data di atas dapat diperhatikan pada tabel di bawah ini.

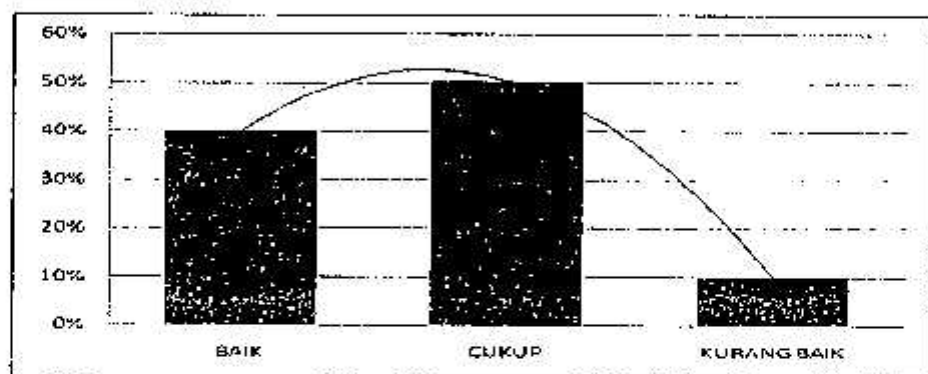
**Tabel. 5.20 Tanggapan Responden Mengenai Pelaksanaan Tugas Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Ditinjau Dari Aspek Tugas dalam Penilaian**

No	Kriteria	Jumlah	%
1	BAIK	61	40%
2	CUKUP	77	50%
3	KURANG BAIK	15	10%
	JUMLAH	153	100%

Secara lebih mendetail dapat diketahui bahwa pada indikator tugas dalam perencanaan didapatkan data bahwa Pelaksanaan Tugas Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) dalam Perencanaan Pembangunan Fisik di Kecamatan Bengkalis dikatakan baik oleh sebanyak 61 orang atau dengan persentase sebesar 40%. Kemudian yang menyatakan cukup baik ada

sebanyak 77 orang dengan persentase sebesar 50%. Dan yang menyatakan kurang baik adalah 10%.

Dapat juga diperhatikan pada grafik batang tentang Tanggapan Responden Mengenai Pelaksanaan Tugas Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) dalam Perencanaan Pembangunan Fisik di Kecamatan Bengkalis Ditinjau Dari Aspek Tugas dalam perencanaan di bawah ini.



Grafik 1.  
Tanggapan Responden Mengenai Pelaksanaan Tugas Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Ditinjau Dari Aspek Tugas dalam Penilaian

Dari data di atas dapat diketahui bahwa responden menyetujui jika tugas dalam perencanaan dapat mendukung Pelaksanaan Tugas Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) dalam Perencanaan Pembangunan Fisik di Kecamatan Bengkalis. Dimana yang menyatakan ya lebih dominan dibandingkan yang menyatakan tidak. Ini membuktikan bahwa Pelaksanaan Tugas Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) dalam Perencanaan Pembangunan Fisik di Kecamatan Bengkalis banyak ditentukan oleh tugas dalam perencanaan.

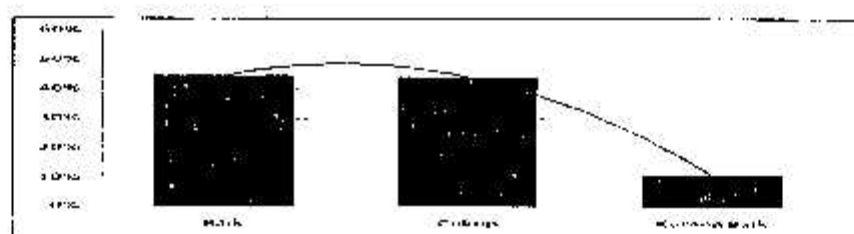
Secara keseluruhan, dari semua indikator dapat dijelaskan seperti di bawah ini:

**Tabel. 5.21 Rekapitulasi Tanggapan Responden Mengenai Pelaksanaan Tugas Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) dalam Perencanaan Pembangunan Fisik di Kecamatan Bengkalis**

No	Indikator	Baik	Cukup	Kurang Baik
1	Tugas dalam perencanaan	45%	45%	10%
2	Tugas dalam pengumpulan data	47%	41%	12%
3	Tugas dalam pelaksanaan pembangunan	47%	41%	12%
4	Tugas dalam penilaian	40%	50%	10%
Jumlah		45%	44%	11%

Dari data di atas dapat diketahui bahwa Tanggapan Responden Mengenai Pelaksanaan Tugas Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) dalam Perencanaan Pembangunan Fisik di kecamatan Bengkalis dari indikator tugas dalam perencanaan, tugas dalam pengumpulan data, tugas dalam pelaksanaan pembangunan, dan tugas dalam penilaian di dapatkan secara keseluruhan yang menyatakan baik sebanyak 45%, kemudian yang menyatakan cukup sebanyak 44% dan yang menyatakan kurang baik sebesar 11%.

Rekapitulasi Tanggapan Responden Mengenai Pelaksanaan Tugas Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) dalam Perencanaan Pembangunan Fisik di kecamatan Bengkalis ini juga dapat diperhatikan pada histogram berikut ini:



**Grafik 1.**

**Rekapitulasi Tanggapan Responden Mengenai Pelaksanaan Tugas Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Bengkalis dalam Perencanaan Pembangunan Fisik di Kecamatan Bengkalis**

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa Pelaksanaan Tugas Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) dalam Perencanaan Pembangunan Fisik di kecamatan Bengkalis dari indikator tugas dalam perencanaan, tugas dalam pengumpulan data, tugas dalam pelaksanaan pembangunan, dan tugas dalam penilaian di dapatkan secara keseluruhan yang menyatakan baik sebanyak 45%, kemudian yang menyatakan cukup sebanyak 44% dan yang menyatakan kurang baik sebesar 11%. Artinya, Pelaksanaan Tugas Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) dalam Perencanaan Pembangunan Fisik di kecamatan Bengkalis telah terlaksana dengan baik.

Sementara itu proses pelaksanaan tugas yang dijalani oleh Bappeda tidak tertutup kemungkinan menemui berbagai kendala/ hambatan-hambatan. Namun, Bappeda selalu berkomitmen untuk terus berkembang serta tanggap terhadap pelaksanaan pembangunan yang ada di Kabupaten Bengkalis. Merencanakan pada dasarnya menentukan kegiatan yang hendak dilakukan pada masa depan. Kegiatan ini dimaksudkan untuk mengatur berbagai sumber daya agar hasil yang dicapai sesuai dengan yang diharapkan.



## **BAB VI**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **6.1 KESIMPULAN**

Dari uraian mengenai Pelaksanaan Tugas Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) dalam Perencanaan Pembangunan Fisik di Kecamatan Bengkalis diatas dapat disimpulkan bahwa :

1. Berdasarkan indikator tugas dalam perencanaan, tugas dalam pengumpulan data, tugas dalam pelaksanaan pembangunan, dan tugas dalam penilaian di dapatkan secara keseluruhan yang menyatakan baik sebanyak 45%, kemudian yang menyatakan cukup sebanyak 44% dan yang menyatakan kurang baik sebesar 11%. Artinya, Pelaksanaan Tugas Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) dalam Perencanaan Pembangunan Fisik di Kecamatan Bengkalis dikatakan baik dan berjalan dengan optimal.
2. Masih ditemuinya hambatan-hambatan untuk menunjang keberhasilan pelaksanaan tugas BAPPEDA Kabupaten Bengkalis diantaranya:
  - Terbatasnya kewenangan BAPPEDA dalam rekrutment pegawai, sehingga terdapat ketidak sesuaian penempatan pejabat struktural dengan latar belakang pendidikan dengan jabatan yang dipimpin.
  - Masih terbatasnya kesediaan data yang akurat yang merupakan bahan acuan dasar bagi proses perencanaan pembangunan daerah.

- Kurangnya kemampuan sumber daya manusia staf BAPPEDA dalam menjabarkan tugas pokok dan fungsinya terutama dalam bidang perencanaan.

## 6.2 SARAN

Dari hasil analisis dan kesimpulan yang telah diuraikan sebelumnya maka, peneliti mencoba memberikan saran yang mungkin berguna dalam rangka meningkatkan prestasi kerja pegawai diantaranya:

1. Setiap personil BAPPEDA Kabupaten Bengkalis dituntut untuk memiliki kepedulian yang tinggi terhadap organisasi secara keseluruhan, tidak hanya puas dengan dapat menyelesaikan tugas pokok dan fungsinya secara baik, tetapi lebih dari itu perlu juga memberikan kontribusi serta memiliki pandangan yang lebih luas dan jernih tentang berbagai aspek secara menyeluruh.
2. Menghadapi setiap kegagalan dalam setiap pelaksanaan tugas pokok, perlu selalu introspeksi dan mawas diri, dengan mencari sebab-sebab kegagalan tersebut pada diri sendiri.
3. Selalu proaktif dalam setiap pelaksanaan tugas, tetapi tidak melakukan tindakan-tindakan yang agresif dan reaktif.
4. Selalu mencermati berbagai peristiwa dan melakukan analisa secara lebih komprehensif dan mengamati perubahan-perubahan situasi yang terjadi.

## DAFTAR PUSTAKA

- Amien, Mappadjanti, 2005. *Kemandirian Lokal, Konsep Pembangunan, Organisasi, dan Pendidikan dalam Perspektif Sains Baru*, Anggota IKAPI, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta
- Bappeda, 2008, *Rencana Strategis Bappeda Kabupaten Bengkalis 2005 – 2010*, Bappeda Kabupaten Bengkalis, Bengkalis
- Bappeda Kabupaten Bengkalis dan BPS Kabupaten Bengkalis, 2005, *Bengkalis Dalam Angka 2005*, Bappeda Kabupaten Bengkalis, Bengkalis
- Bappeda, 2010, *Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (LAKIP) Kabupaten Bengkalis Tahun 2009*, Bappeda Kabupaten Bengkalis, Bengkalis
- Bappeda, 2009, *Musyawarah Rencana Pembangunan Daerah (Musreanbangda)*, Bappeda Kabupaten Bengkalis, Bengkalis
- Bintoro Tjokroamidjojo, 2003, *Administrasi Pembangunan*, Penerbit Bumi Aksara, Yakarta
- Depdiknas. 2002. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Balai Pustaka. Jakarta.
- Ernie Tisnowati Sule & Kurniawan Saefullah. 2006. *Pengantar Manajemen*. Prenada Media. Jakarta.
- Georpe Terry, 1997, cet. 5, *Principles Of Management*, Richard Irwin Inc, Homewood, Illinois
- Gaspersz Vincent, 2004, *Perencanaan Strategik untuk Peningkatan Kinerja Sektor Publik*, Penerbit PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta
- Husein Umar, 1999, *Metode Penelitian untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*, Penerbit PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- L.H. Tosi, dkk, 1994, *Managing Organizational Behavior*, 3rded, Cambridge, Blackwell
- Manullang, 2001, *Manajemen Perusahaan dan Pemerintahan*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta
- Mohc. As'ad, 2000, *Psikologi Industri*, Penerbit Liberty, Yogyakarta

- Pemerintah Kabupaten Bengkalis, 2006, *Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Akhir Masa Jabatan Bupati Bengkalis Periode 2001-2006, Buku III*, Pemerintah Kabuapten Bengkalis, Bengkalis
- Sekretariat Daerah, 2005, *Peraturan Daerah Nomor 4 tahun 2005 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bengkalis*, Bagian Hukum Kabupaten Bengkalis, Bengkalis
- S.P Siagian, 2000, *Administrasi Pembangunan*, Penerbit Bumi Aksara , Jakarta
- \_\_\_\_\_, 2003, *Filsafat Administrasi*, Penerbit Ghalia Indonesia, Yakarta
- Sudjana. 2001. *Pendidikan Luar Sekolah*. Bandung. Falah Production
- Sugiyono, 2005, *Metode dan Pengembangan Penelitian*, Yogyakarta. Rajawali
- Soetomo. 2009. *Pembangunan Masyarakat*. Jakarta. Pustaka Pelajar
- Umberto Sihombing, 1999. *Manajemen Kepegawaian Sipil*. Jakarta. Bumi Aksara